

**jogja**  
Istimewa



Rancangan Akhir  
**RENSTRA**  
**2022 - 2027**

**Rencana Strategis**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2022 - 2027**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

---

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 telah dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 menjadi Rancangan Akhir dokumen perencanaan lima tahunan DLHK DIY yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, yg disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 dan bersifat indikatif.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 ini kami sampaikan terima kasih.

**Yogyakarta, 05 Mei 2023**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Ketutanan DIY**



**Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si**  
**NIP. 196509041992031017**

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	2
<b>DAFTAR ISI</b>	3
<b>DAFTAR TABEL</b>	4
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	5
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan	8
a. Maksud	10
b. Tujuan	10
c. Landasan Hukum	8
d. Sistematika Penulisan	11
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	42
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	45
A. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	46
B. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	50
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
3.3 Telaah Renstra K/L dan Kabupaten/Kota	58
a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	58
b. Renstra DLH Kabupaten/Kota	61
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	71
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN</b>	77
4.1 Tujuan OPD	77
4.2 Sasaran OPD	77
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	80
5.1 Strategi	80
5.2 Arah Kebijakan	80
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	84
<b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	165
<b>BAB 8 PENUTUP</b>	168
8.1 Catatan Penting	168
8.2 Kaidah Pelaksanaan	168
8.3 Rencana Tindak Lanjut	169

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1 Profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	15
Tabel 2 Sarana dan Prasarana DLHK DIY.....	17
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	21
Tabel 4 Nilai IKLH DIY 2018 – 2022.....	22
Tabel 5 Nilai Indeks Pencemaran Air Tahun 2023 per Periode.....	23
Tabel 6 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2022.....	25
Tabel 7 Hasil Perhitungan IKTL DIY.....	26
Tabel 8 Review Rumus IKLH .....	27
Tabel 9 Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .....	28
Tabel 10 Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2022 .....	35
Tabel 11 Ketercapaian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.....	37
Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	40
Tabel 13 Status kualitas air sungai DIY Tahun 2022 .....	48
Tabel 14 Penanganan lahan kritis 2018 - 2022.....	51
Tabel 15 Kawasan Konservasi di DIY .....	52
Tabel 16 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	54
Tabel 17 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK .....	59
Tabel 18 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.....	61
Tabel 19 Analisis TPB yang diampu DLHK DIY dalam KLHS.....	67
Tabel 20 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	78
Tabel 21 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	82
Tabel 22 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	84
Tabel 23 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	165

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
Gambar 2 Struktur Organisasi DLHK DIY .....	15
Gambar 3 Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat Pendidikan .....	16
Gambar 4 Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk .....	16
Gambar 7 Perbandingan Target dan Realisasi Ketercapaian IKLH DIY 2018 - 2022.....	22
Gambar 8 Data capaian IKTL DIY 2018 - 2022 .....	49

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

---

## **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di DIY. Penyusunan Renstra DLHK DIY berpedoman pada Bagian Keenam Paragraf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

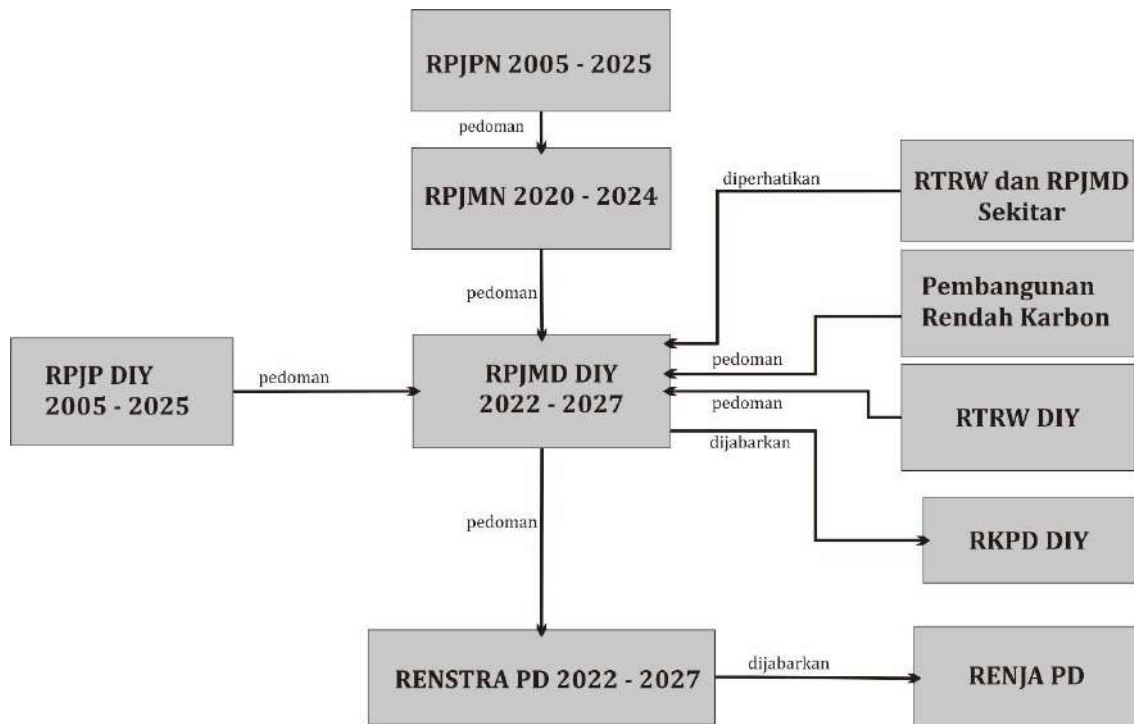
Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJPN Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Penyelarasan program prioritas daerah dalam RPJPD DIY Tahun 2005 – 2025 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2022-2027;

3. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022;
4. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
5. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
6. Kebijakan nasional
7. Regulasi yang berlaku
8. Saran dan/ atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah;

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2027 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disempurnakan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Renstra Perangkat Daerah yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Alur proses penyusunan dokumen perencanaan dan posisi Renstra dalam perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada bagan alir berikut:





**Gambar 1 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 17) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
- 19) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;
- 20) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027;
- 21) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 22) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- 23) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 24) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027 adalah untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 bertujuan:

- 1) Terwujudnya perencanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi DLHK DIY yang berkualitas, kolaboratif, dan akuntabel
- 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- 3) Tersedianya tolak ukur untuk mengukur kinerja dan evaluasi kinerja di lingkup DLHK DIY

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra DLHK DIY Tahun 2022-2027 :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang serta Maksud, Tujuan dan Dasar Penyusunan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat gambaran umum pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah

### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya

### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DLHK DIY) berdiri mulai 1 Januari 2019 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta DLHK DIY merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup kehutanan.

Kelembagaan DLHK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK DIY memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang kelembagaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas LHK DIY. Untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi maka dilakukan penataan kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

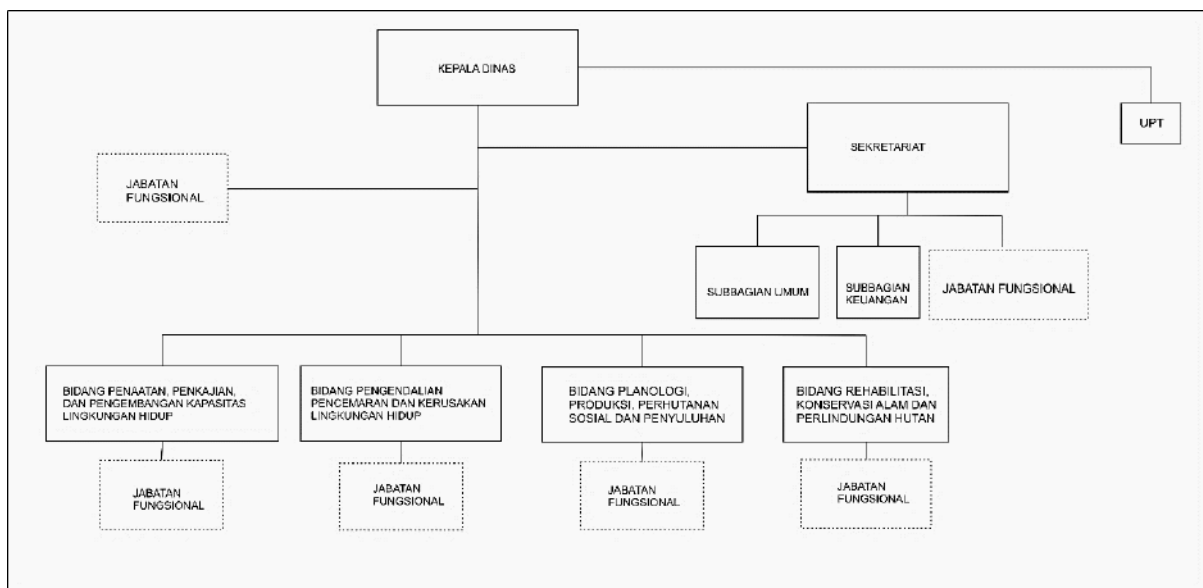
Kedudukan DLHK DIY sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugasnya DLHK DIY mempunyai fungsi dalam :

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
14. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
16. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
17. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas
18. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas
19. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi DLHK DIY yaitu Kepala Dinas membawahi 1 Sekretariat, 4 Bidang, 5 Balai, serta 6 jenis jabatan fungsional tertentu. Struktur tersebut telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Masing – masing menerima mandat kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara lebih jelasnya struktur organisasi DLHK DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Pergub No.111 Tahun 2022

**Gambar 2 Struktur Organisasi DLHK DIY**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan SDM DLHK DIY secara total per 31 Maret 2023<sup>1</sup> adalah 356 orang. Secara terperinci profil kepegawaian (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut.

**Tabel 1 Profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY**

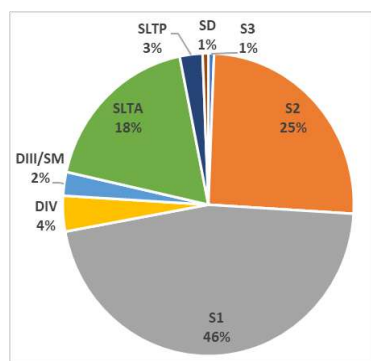
No.	Unit Kerja	PNS	Tenaga Bantu	PPPK
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)	92	27	1

<sup>1</sup> Berdasarkan data internal Subbag Umum DLHK DIY

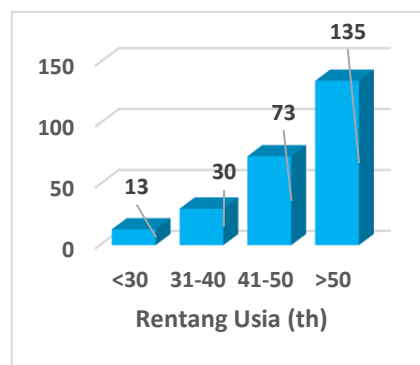


2.	Balai Laboratorium Lingkungan	14	12	-
3.	Balai Pengelolaan Sampah	16	2	-
4.	Balai Perbenihan Kehutanan	18	4	-
5.	Balai Tahura Bunder	18	13	-
<b>Jumlah</b>		<b>158</b>	<b>58</b>	<b>1</b>
6.	Balai KPH Yogyakarta (KPA)	89	50	-
<b>Jumlah</b>		<b>247</b>	<b>108</b>	<b>1</b>

Sumber : Data Kepegawaian BKD



Gambar 3 Proporsi pegawai dinas induk berdasarkan tingkat Pendidikan



Gambar 4 Sebaran Usia Pegawai Dinas Induk

SDM berstatus PNS dan/atau CPNS di dinas induk berjumlah 158 orang. Proporsi gender di dinas induk relatif seimbang dengan jumlah pegawai laki – laki 90 orang (56,96 %) sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan 68 orang (43,04 %). Hampir separuh pegawai dinas induk berpendidikan S1 (73 orang, 46,2 %), diikuti dengan S2 (40 orang, 25,32 %), SLTA/ sederajat (29 orang, 18,35 %), DIV (6 orang, 3,80 %), SLTP/ sederajat (4 orang, 2,53 %), DIII (3 orang, 1,9 %), dan paling sedikit SD dan S3 masing – masing 1 orang (0,61 %). Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, lebih dari separuh pegawai dinas induk berusia 51 tahun ke atas (135 orang, 53,78 %). Diikuti oleh pegawai berusia 41 - 50 tahun (73 orang, 29,08%), pegawai berusia 31 – 40 tahun (30 orang, 11,95 %) dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah (13 orang, 5,18 %).

Sebagai satu – satunya unit organisasi di bawah DLHK DIY yang memegang KPA, Balai KPH Yogyakarta memiliki proporsi SDM yang cukup besar karena harus mengawasi

dan mengelola hutan negara seluas 15.581 ha.<sup>2</sup> Dari 89 orang pegawai (PNS), pegawai laki – laki Balai KPH Yogyakarta sangat mendominasi dengan jumlah sebanyak 80 orang (89,89%) jika dibandingkan dengan pegawai perempuan sebanyak 9 orang (10,11 %). Sebagian besar SDM di Balai KPH memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 48 orang atau 53,93%, diikuti oleh S1 sebanyak 21 orang atau 23,60%, SLTP/Sederajat sebanyak 8 orang atau 8,9 %, SD sebanyak 6 orang atau 6,74 %, S2 sebanyak 3 orang, atau 3,37%, DIII sebanyak 2 orang atau 2,25% dan paling sedikit D IV sebanyak 1 orang atau 1,12%. Sementara itu, berdasarkan sebaran usia, pegawai Balai KPH Yogyakarta sebagian besar berusia di atas 50 tahun sebanyak 55 orang atau 59,14 %. Diikuti oleh pegawai berusia 41 -50 tahun sebanyak 30 orang atau 32,26 %, pegawai berusia 31 – 40 tahun sebanyak 4 orang atau 4,30 % dan yang paling sedikit pegawai berusia 30 tahun ke bawah sebanyak 4 orang atau 4,30 %.

Berdasarkan grafik sebaran usia (Induk dan Balai KPH), sebanyak 53,78 % pegawai DLHK DIY berusia 51 tahun ke atas. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat karakteristik pekerjaan di DLHK DIY yang mengharuskan SDM lebih banyak di hutan dan/atau lapangan serta ritme kerja yang semakin cepat menuntut SDM untuk lebih sigap, produktif dan profesional. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan relatif seimbang dengan rasio sebesar 16:10. Pada awal tahun 2022, sesuai dengan kebijakan adanya penyederhanaan birokrasi maka sejumlah 13 orang pejabat eselon IV non UPT DLHK DIY dimutasi menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 hampir semua jabatan struktural terisi penuh, kecuali jabatan Sekretaris Dinas dan jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Balai Tahura Bunder. Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di DLHK DIY.

Dukungan sarana dan prasarana secara DLHK DIY secara total per 31 Desember 2022 adalah Rp.196.782.038.667,92. Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana DLHK DIY secara terperinci adalah sebagai berikut.

**Tabel 2 Sarana dan Prasarana DLHK DIY**

---

<sup>2</sup>Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 122 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta

NO.	KODE			NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI DALAM RUPIAH
1	01	03		<b>ASET TETAP</b>	<b>11.022</b>	<b>190.510.947.574,92</b>
a.			01	<b>TANAH</b>	<b>42</b>	<b>42.819.470.972,00</b>
			01 01	TANAH	42	42.819.470.972,00
b.			02	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>6.842</b>	<b>64.496.919.920,92</b>
			02 01	ALAT BESAR	123	34.192.635.402,00
			02 02	ALAT ANGKUTAN	227	6.779.082.354,40
			02 03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	164	909.662.308,52
			02 04	ALAT PERTANIAN	819	139.551.500,00
			02 05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.715	6.101.051.866,00
			02 06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	293	1.568.976.913,00
			02 07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7	14.150.000,00
			02 08	ALAT LABORATORIUM	895	11.810.902.898,00
			02 09	ALAT PERSENJATAAN	39	38.445.550,00
			02 10	KOMPUTER	422	2.547.468.379,00
			02 11	ALAT EKSPLORASI	4	13.392.000,00
			02 12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			02 13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	4	172.000.000,00
			02 14	ALAT BANTU EKSPLORASI	1	10.705.000,00
			02 15	ALAT KESELAMATAN KERJA	27	11,137.500,00
			02 16	ALAT PERAGA	0	0
			02 17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	128.000.000,00
			02 18	RAMBU – RAMBU	0	0
			02 19	PERALATAN OLAH RAGA	100	59.758.250,00
c.			03	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>182</b>	<b>49.387.098.040,00</b>
			03 01	BANGUNAN GEDUNG	182	49.387.098.040,00
			03 02	MONUMEN	2	269.348.000,00
			03 03	BANGUNAN MENARA	0	0
			03 04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	60.031.880,00
			04	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>135</b>	<b>29.906.990.055,00</b>
			04 01	JALAN DAN JEMBATAN	53	14.939.587.000,00
			04 02	BANGUNAN AIR	34	12.614.631.348,00
			04 03	INSTALASI	26	1.620.158.027,00
			04 04	JARINGAN	22	732.613.680,00
d.			05	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>3.896</b>	<b>1.125.467.987,00</b>
			05 01	BAHAN PERPUSTAKAAN	3.799	215.227.501,00
			05 02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA GA	0	0
			05 03	HEWAN	0	0
			05 04	BIOTA PERAIRAN	0	0
			05 05	TANAMAN	7	910.240.486,00
			05 06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
			05 07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
e.			06	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>15</b>	<b>2.766.000.600,00</b>

NO.	KODE		NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI DALAM RUPIAH
		06 01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15	2.766.000.600,00
f.		07	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		07 01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	0	0
		07 02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
		07 03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
		07 04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2.	05		<b>ASET LAINNYA</b>	<b>741</b>	<b>6.271.091.093,00</b>
a.		02	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		02 01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
b.		03	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>12</b>	<b>3.996.135.250,00</b>
		03 01	ASET TIDAK BERWUJUD	12	3.996.135.250,00
c.		04	<b>ASET LAIN-LAIN</b>	<b>729</b>	<b>2.274.955.843,00</b>
		04 01	ASET LAIN-LAIN	729	2.274.955.843,00
d.		05	<b>AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		05 01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
		06 01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			<b>TOTAL</b>	<b>11.763</b>	<b>195.727.994.732,92</b>

\*Sumber : Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun Anggaran 2022 (DLHK DIY, 2022)

Jumlah kendaraan dinas (induk dan Balai KPH) sebanyak seratus sembilan puluh sembilan unit terdiri dari:

1. Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang dan Barang sebanyak dua puluh tiga unit
2. Kendaraan Roda Tiga sebanyak tiga unit
3. Kendaraan Roda Dua sebanyak seratus tujuh puluh dua unit
4. Kendaraan Khusus sebanyak satu unit

DLHK DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing balai/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas induk dilengkapi dengan fasilitas enam aula (Aula Jati, Aula Kayuputih, Aula Argulobang, Aula Adipura, Aula Kalpataru, Aula Sonokeling), ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Juga terdapat toilet ramah gender di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih (Pabrik Sendangmole dan Pabrik Gelaran), lima kantor BDH (BDH Kulon Progo – Bantul, BDH Karangmojo, BDH Panggang, BDH Playen, BDH Paliyan), dua puluh empat kantor RPH dan satu laboratorium lingkungan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filing cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal*

*Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Renstra DLHK DIY 2017 – 2022 merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022. Beberapa dinamika yang terjadi antara lain adanya perubahan arah kebijakan pada RPJMD DIY tahun 2017-2022. Sesuai mandat perubahan kelembagaan OPD berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 terjadi penggabungan instansi Badan Lingkungan Hidup DIY dan Dinas Kehutanan DIY. Selain itu juga akibat adanya faktor *Force Majeur* yaitu pada tahun 2020 ketika terjadi Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan terjadinya *refocussing* target kinerja dan rasionalisasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Terakhir pada tahun 2021 sebagai langkah tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dilakukan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan penambahan nomenklatur baru subkegiatan.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan DLHK DIY pada periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta**

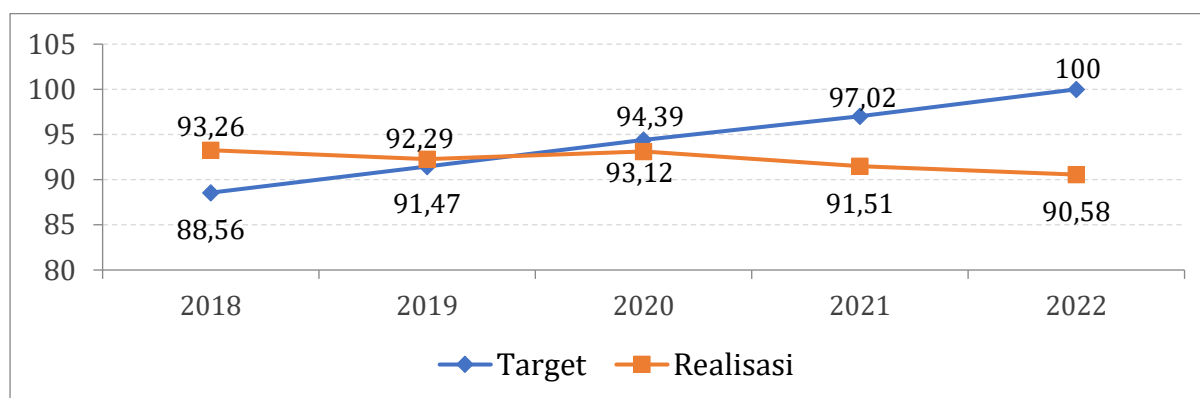
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	n/a	n/a	n/a	88,56 %	91,47 %	94,39 %	97,02 %	100 %	93,26	92,29 %	98,65 %	97,02 %	90,58 %	1,05	1,008	0,98	0,97	0,90
2.	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB	n/a	n/a	n/a	734.713 juta rupiah	742.060 juta rupiah	749.480 juta rupiah	756.975 juta rupiah	764.545 juta rupiah	102.026 juta rupiah	1086.968,1 juta rupiah	955.42 juta rupiah	1.004.249,7 juta rupiah	891,29 juta rupiah	1,388	1,46	1,287	1,334	1,16

Pada periode RPJMD 2017 – 2022 terdapat 2 sasaran strategis dengan 2 indikator. Berikut analisis ketercapaian masing – masing indikator sasaran strategis tersebut.

### 1. Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup

Indikator pertama yaitu persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Angka ini berasal dari capaian IKLH tahun n yang tercapai dibanding target IKLH pada tahun akhir RPJMD dikali seratus. Realisasi pada tahun 2022 sekaligus sebagai akhir masa periode RPJMD sebesar 90,58%. Angka ini belum memenuhi target.

Untuk perhitungan IKLH hingga tahun 2022 terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Selama periode tersebut, nilai IKLH DIY fluktuatif dengan kecenderungan menurun (Gambar 3). Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 72,42 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk kategori kurang baik.



Gambar 5 Perbandingan Target dan Realisasi Ketercapaian IKLH DIY 2018 - 2022

Tabel 4 Nilai IKLH DIY 2018 – 2022

	Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2018	34,20	40,25	87,06	84,24	55,5	60,86
2019	36,49	38,65	87,73	85,25	58,18	59,70
2020	38,60	38,43	88,40	89,14	60,86	58,32
2021	40,80	35,42	89,07	88,57	63,05	58,34
2022	42,50	32,14	89,74	89,16	66,20	58,82

(Sumber: DLHK DIY, 2022)

Salah satu faktor yang menyebabkan terus menurunnya nilai IKLH yaitu Indeks

Kualitas Air (IKA). Komponen pembentuk IKLH ini memiliki kisaran nilai paling rendah dengan tren mengalami penurunan yaitu dari 40,25 menjadi 32,14. Penurunan IKA ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, belum optimalnya IPAL komunal, fosfat dari aktivitas domestik dan usaha binatu skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim. Pada periode pengambilan sampel yang dilakukan ketika musim – musim kemarau debit air sungai kecil sehingga kadar pencemaran menjadi semakin tinggi.

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 10 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun 10 sungai yang dipantau adalah : Sungai Oyo, S. Kuning, S. Tambakbayan, S. Gajahwong, S. Belik, S. Code, S. Winongo, S. Bedog, S. Konteng, dan S. Bulus. Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 3 (tiga) periode yaitu Bulan Juni, Agustus, dan Oktober mewakili 2 musim (musim penghujan dan musim kemarau) dan pancaroba.

Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari: 6 parameter fisik (temperatur, bau, kekeruhan, warna, TDS, TSS); 28 parameter kimia (DO, BOD, COD, TSS, TDS, PO4, dst.); 2 parameter mikrobiologi : Fecal Coli dan Total Coliform. Namun, untuk keperluan perhitungan IKA hanya meliputi 7 (tujuh) parameter, yaitu : TSS, DO, BOD, COD, PO4, Fecal Coli dan Total Coliform.

**Tabel 5 Nilai Indeks Pencemaran Air Tahun 2023 per Periode**

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode I (JUNI) 7 PARAMETER	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode II (AGUSTUS) 7 PARAMETER	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode III (OKTOBER) 7 PARAMETER
Winongo	27,27	17,50	28,82
Code	27,14	35,00	31,43
Gajahwong	25,45	30,00	34,1
Tambakbayan	30,00	25,00	35,00
Kuning	43,33	35,00	42,00
Konteng	34,00	30,00	38,00
Bedog	30,00	26,00	37,14
Belik	18,57	23,33	30,00
Bulus	50,00	30,00	40,00
Oyo	40,77	25,00	43,85
Nilai IKA Sungai DIY Per Periode	32,65	27,68	36,09
Nilai IKA Sungai DIY Rata-Rata	32,14		

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY (2022), diolah



Berdasarkan hasil kajian<sup>3</sup>, diperoleh bahwa sumber pencemar air terbanyak di DIY berada di Kabupaten Sleman (49%) yang didominasi oleh kegiatan pariwisata yang mencapai 1620 sumber, diikuti oleh industri 599 sumber, dan fasyankes 110 sumber dari keseluruhan sumber pencemar air yang ada di DIY. Kota Yogyakarta menempati urutan kedua (22%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa wilayah Kota Yogyakarta terancam secara serius oleh pencemaran air dibandingkan kabupaten lain di D.I.Yogyakarta, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta adalah yang terkecil dibanding 4 (empat kabupaten lainnya). Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah Kabupaten Sleman merupakan wilayah *recharge area* (tangkapan hujan) sebagai sumber air tanah yang dimanfaatkan sebagian besar oleh penduduk di Kabupaten Sleman sendiri maupun di Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul. Bila sumber pencemar di wilayah tangkapan bertambah maka akan membahayakan organisme di wilayah bawahnya, termasuk manusia dan juga tanaman pertanian. Efek yang muncul akibat pencemaran di daerah tangkapan hujan seperti efek bola salju dan yang paling dirugikan adalah Kabupaten Bantul sebab mendapat suplai pencemaran air dari Kabupaten Sleman dan juga dari Kota Yogyakarta (dua besar sumber pencemar air di D.I.Yogyakarta).

Sementara dari sisi analisis sumber pencemar air dari sumber tak tentu diperoleh informasi bahwa potensi sumber pencemar air tak tentu di DIY didominasi dari permukiman (28,23%), Tegalan/Ladang (32,95%) dan Sawah Irigasi (16,5%). Potensi sumber pencemar air dari permukiman didominasi oleh limbah domestik sedangkan sumber pencemar air dari lahan pertanian (tegalan/ladang dan atau sawah) didominasi dari pencemaran sisa atau residu dari pupuk dan pestisida. Data hasil analisis potensi besaran limbah cair domestik dari sumber tak tentu menunjukkan bahwa debit limbah dengan klasifikasi sangat tinggi (>191,99) berada di Sub DAS Bedog di Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Gamping serta Sub DAS Konteng di Kapanewon Gamping, sementara yang lain masuk klasifikasi sedang dan rendah.

Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), metodologi perhitungan yang digunakan mengadopsi dari Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata

---

<sup>3</sup> Kajian Inventarisasi Sumber Pencemar (2022) oleh DLHK DIY

perjam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode pasif yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode pasif mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan.

Tabel 6 Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu			Rataan
		NO <sub>2</sub> (Åµg/m <sup>3</sup> ) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (Åµg/m <sup>3</sup> ) (Sulfur Dioksida)	NO <sub>2</sub> (Åµg/m <sup>3</sup> ) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (Åµg/m <sup>3</sup> ) (Sulfur Dioksida)		INDEKS
1	Kabupaten Bantul	14,35	6,66	0,36	0,33	0,35	86,34
2	Kabupaten Sleman	12,91	9,07	0,32	0,45	0,39	83,99
3	Kota Yogyakarta	12,79	4,27	0,32	0,21	0,27	90,74
4	Kabupaten Kulon Progo	9,94	5,29	0,25	0,26	0,26	91,32
5	Kabupaten Gunung Kidul	10,26	3,75	0,26	0,19	0,22	93,21
6	PROVINSI DIY	12,05	5,81	0,30	0,29	0,30	89,16

Sumber: Laporan IKLH DIY (2022), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 89,16 sehingga belum memenuhi target RPJMD (89,74). Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2021 sebesar 88,57 maka pada tahun 2022 nilai IKU mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. IKU DIY diperoleh dr agregat angka kabupaten/kota. IKU DIY masuk kategori Baik. IKU tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul dengan angka 89,16. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pencemaran udara khususnya NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> serta masih tingginya luas area ruang terbuka hijau (3029,59 ha) belum termasuk luas hutan

negara. Sementara nilai IKU terndah berada di Kabupaten Sleman dengan angka 83,99 disebabkan nilai pencemaran NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tertinggi jika dibandingkan wilayah yang lain.

Sedangkan untuk nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), metode yang digunakan adalah dengan olah data Citra satelit dari KLHK. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH). Hasil perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam tabe berikut.

Tabel 7 Hasil Perhitungan IKTL DIY

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
1	Hutan Produksi	13421,000	1	13421,000
2	Hutan Lindung	2297,576	1	2297,576
3	Hutan Rakyat	65896,694	1	65896,694
4	Cagar Alam Geologi	141,520	1	141,520
5	Cagar Alam	23,640	1	23,640
6	Taman Wisata Alam	1084,000	1	1084,000
7	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8	Taman Nasional	2050,040	1	2050,040
9	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10	Suaka Marga Satwa	619,824	1	619,824
11	Rawan Bencana Alam Geologi	0,000	1	0,000
12	RHL (pusat)	3081,746	1	3081,746
13	Taman Kehati	47,800	1	47,800
14	Perkebunan	73777,935	0,4	29511,174
15	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	4296,275	0,1	429,627
16	Sempadan Pantai	1691,622	0,6	1014,973
17	Sempadan Sungai	4503,196	0,6	2701,918
18	RTH	4613,319	0,6	2767,991
TOTAL		178419,15		125962,489

Sumber: IKLH DIY (2022), diolah

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat dihitung Tutupan hutan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 TH &= \text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi} / \text{Luas wilayah} \\
 &= 125962,489 / 318600 \\
 &= 0,395362 \\
 IKTL &= 100 - ((84,3 - (0,395362 \times 100)) \times 50 / 54,3) \\
 &= 100 - ((84,3 - 39,5362) \times 0,92)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 100 - (44,76375 \times 0,92) \\
&= 100 - 41,1827 \\
&= \mathbf{58,82}
\end{aligned}$$

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 adalah 58,82. Jika dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2021 sebesar 58,34 realisasi IKTL tahun 2022 mengalami kenaikan. Akan tetapi, target IKTL dalam RPJMD adalah 66,2 sehingga realisasi IKTL tahun 2022 belum mencapai target.

Dengan adanya ketentuan baru S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 tertanggal 4 Desember 2020 dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdapat penambahan kriteria IKLH yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut. Karena di DIY tidak terdapat lahan gambut maka untuk perhitungan nilai IKLH pada periode selanjutnya DLHK DIY hanya menambahkan Indeks Kualitas Air Laut.

**Tabel 8 Review Rumus IKLH**

Komponen	Semula		Menjadi	
	Formula	Bobot	Formula	Bobot
Indeks Kualitas Udara	$100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$	<b>0,3</b>	$100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$	<b>0,428</b>
Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu}) * 100}{\sum (\text{status mutu air})}$	<b>0,3</b>	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu}) * 100}{\sum (\text{status mutu air})}$	<b>0,34</b>
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	<b>0,4</b>	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	<b>0,133</b>
Indeks Kualitas Air Laut	<b>n/a</b>			<b>0,099</b>

Upaya pencapaian target persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan. Adapun rekapitulasi ketercapaian program urusan pemerintahan bidang kehutanan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9 Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Program Sesuai RPJMD DIY 2017 - 2022	Program Sesuai Kepmendagri 50	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	2018	2019			2020			2021			2022		
						Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
1	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	Ha	n/a	160	166	103,75	165,00	75,00	45,45	170	272	160,00	175	1162,5	664,29%
	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		Persentase Penurunan kerusakan hutan (%)	%	n/a	0,1	0,3	300,00	0,10	0,80	800,00	0,1	2,15	2150,00	0,10	0,70	700%
2	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	n/a	100	100	100,00	100,00	193,75	193,75	100	100	100	100	100	100%

No	Program Sesuai RPJMD DIY 2017 - 2022	Program Sesuai Kepmendagri 50	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	2018	2019			2020			2021			2022		
						Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai (usaha/kegiatan)	usaha/kegiatan	n/a	192	192	100,00	222,00	150,00	67,57	237	246	103,80	237	240	101,27 %
			Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source) yang ditangani di 10 sungai (lokasi)	lokasi	n/a	72	72	100,00	96,00	20,00	20,83	120	125	104,17	120	214	178,3%
			Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 Kab/Kota (usaha/kegiatan)	usaha/kegiatan	n/a	65	65	100,00	70,00	70,00	100,00	75	89	118,67	80	144	180%

No	Program Sesuai RPJMD DIY 2017 - 2022	Program Sesuai Kepmendagri 50	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	2018	2019			2020			2021			2022		
						Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	n/a	600	600	100,00	660,00	573,97	86,97	720	794,09	110,29	780	740	94,87%
5	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	persen	n/a	45	38,75	86,11	48,75	30,00	61,54	52,5	45	85,71	56,25	56,25	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	n/a	3	6	200,00	3,00	1,00	33,33	3	10	333,33	3	22	733%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh program pendukung sasaran sudah memenuhi target. Namun jika dikaitkan dengan *outcome* indikator sasaran yang belum memenuhi target, maka dapat diinterpretasikan terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang perlu disempurnakan di periode RPJMD berikutnya. Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Dari Tahun 2019 – 2020 Balai Laboratorium Lingkungan mendukung sasaran Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup. Hal ini dianggap kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Laboratorium Lingkungan yang cenderung pada pengendalian pencemaran (terkait IKLH). Oleh karena itu pada tahun 2021, kegiatan dan subkegiatan yang terkait pengelolaan laboratorium lingkungan dialihkan untuk mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan/Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data analisis kinerja Balai Laboratorium Lingkungan, pelayanan laboratorium pada tahun 2019 mengeluarkan 276 Laporan Hasil Uji (LHU), menurun menjadi 247 LHU pada tahun 2020, 533 LHU pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 berhasil membukukan 860 LHU. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan lesunya sektor jasa (perhotelan dan bandara), sektor industri, dan sektor pendidikan (penelitian mahasiswa) sehingga jumlah sampel yang masuk juga menurun. Dengan semakin meningkatnya tingkat vaksinasi, diharapkan meski pandemi masih berlangsung *outlook* perekonomian di tahun 2023 dapat semakin membaik sehingga untukantisipasi periode berikutnya Balai Laboratorium Lingkungan berencana meningkatkan kapasitas pengujian. Sementara dari segi jenis parameter yang diujikan, Balai Laboratorium Lingkungan pada periode 2017 -2022 hanya mampu menguji parameter kualitas air, yaitu sebanyak 48 parameter (logam total dan terlarut). Untuk periode selanjutnya direncanakan akan menambah parameter ruang lingkup akreditasi dan layanan pengujian parameter kualitas udara (9 parameter).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan strategi penting dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas



lingkungan. Aktivitas utama yang menjadi indikator kinerja pada periode 2017 – 2022 adalah pembinaan yang difokuskan pada sumber pencemar *point source* dan *non point source*. Akan tetapi, pembinaan yang dilaksanakan masih bersifat temporer sementara yang lebih dibutuhkan adalah pendampingan intensif ke peserta yang dibina untuk memastikan implementasi di lapangan. Belum adanya Fungsional Penyuluh Lingkungan di DLHK DIY menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya diharapkan program tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan koordinasi lintas bidang dan lintas sektor, melakukan evaluasi titik pantau, mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan IKLH dan meningkatkan pelibatan aktif masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan dengan mengintensifkan pendampingan.

Selain memenuhi kebutuhan terkait perhitungan nilai IKLH, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga memiliki tugas menyediakan data terkait pencemaran yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan. Data – data tersebut antara lain data kualitas air tanah, kualitas air permukaan dan data kualitas air limbah. Data tersebut diperlukan sebagai bahan masukan untuk kegiatan penataan dan pengawasan lingkungan.

- c. Sampai tahun 2022, terdapat 141 permohonan izin yang masuk, 17 dokumen status masih proses dan terdapat 124 izin dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh provinsi, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) AMDAL dan UKL-UPL 39 dokumen
  - 2) DELH DPLH 4 dokumen
  - 3) Dokumen Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sejumlah 18 dokumen<sup>4</sup>
  - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 13 dokumen
  - 5) Dokumen lingkungan lainnya 50 dokumen

Kapasitas SDM yang dimiliki DLHK DIY tahun 2022 yaitu 4 orang PPLH aktif, terdiri dari 1 orang PPLH Ahli Muda dan 3 orang PPLH Ahli Pertama serta ketiadaan PPNS. Untuk dapat mengawasi hingga 120 usaha/kegiatan per tahun yang merupakan kewenangan provinsi maka perlu setidaknya 5 orang PPLH.

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha kewenangan penyelesaian kasus tambang menjadi Kewenangan Pusat (Menteri)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya, ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup bisa dilihat dari :

- a) Ketaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait dengan Persetujuan lingkungan
- b) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah)
- c) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- d) Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3), Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)

Dari target tingkat ketaatan DLHK DIY tahun 2022, dari 80 usaha dan/atau Kegiatan (56,25%), terealisasi 45 usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT (56,25%) dan 35 usaha dan/atau Kegiatan TIDAK TAAT (43,75%), yang disebabkan karena:

- a) Sejumlah 26 (dua puluh enam) Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Pembuangan/Pemanfaatan); Proses Perizinan Air Limbah ke Sumber Air di wilayah DIY menjadi kendala karena jarak lokasi kegiatan dengan sumber air yang jauh sehingga tidak terpenuhi terpenuhi persyaratan teknis dan harus melibatkan rekomendasi dari instansi BWSO
- b) Sejumlah 25 (Dua Puluh Lima) Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penghasil Limbah B3/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
- c) Sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Usaha dan/atau Kegiatan belum seluruhnya melaksanakan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan/Persetujuan Lingkungan

d. Selama periode 2017 – 2022, Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam tidak menangani hutan kota. Meskipun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan hutan kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, akan tetapi sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor 525/6709 perihal Penyelenggaraan Hutan Kota, berdasarkan fakta di lapangan hutan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta status lahannya merupakan aset Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyelenggaraan hutan kota menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Sehingga di periode selanjutnya program/kegiatan/subkegiatan yang terkait hutan kota tidak menjadi kewenangan DLHK DIY. TPA Regional Piyungan merupakan tempat untuk pengelolaan akhir sampah yang bersumber dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul yang umur teknisnya berakhir pada tahun 2019<sup>5</sup> sehingga diperlukan penanganan sampah mulai dari sumber sebelum ditangani dengan skema KPBU. Agar operasionalisasi TPA tetap berjalan maka prioritas pendanaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan adalah untuk penambahan sarana dan prasarana khususnya alat berat yang digunakan untuk penataan sampah, optimalisasi lahan yang dimiliki untuk menampung sampah yang dilakukan penataan sampah dengan metode terasiring serta penambahan lahan baru untuk dapat menampung sampah sebelum KPBU operasional. Rencana KPBU mulai dicetuskan pada tahun 2019 dan saat ini sudah sampai tahap penyusunan *Final Business Case* (FBC).

## **2. Nilai Subsektor Kehutanan dalam PDRB**

Indikator kinerja sasaran OPD kedua yaitu nilai subsektor kehutanan dalam PDRB. Realisasi nilai subsektor kehutanan dalam PDRB sebesar 891,29 juta rupiah sehingga persentasenya mencapai 116,5%. Angka realisasi ini berkontribusi sebesar 8,89% terhadap capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil kajian Laporan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kab. Bantul (2017)

Pemanfaatan hutan lestari harus berpegang pada konsep 5 (lima) pilar pengelolaan hutan lestari yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pemanfaatan hutan meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Secara berangsur-angsur, kinerja usaha sektor kehutanan sudah mulai bangkit dari keterpurukan karena efek pandemi Covid-19 dan menunjukkan tren yang positif. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya jumlah produksi kayu bulat. Pada tahun 2021 jumlah produksi kayu hutan rakyat sebesar 95.420,08 m<sup>3</sup> atau meningkat 38,11 % dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah produksi sebesar 69.085,70 m<sup>3</sup>, sementara untuk data tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV mencapai 92.158,89 m<sup>3</sup>. Adapun rekapitulasi hasil produksi sektor kehutanan secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 10 Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2022**

No	Sub Elemen	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Hasil Hutan Non HPH</b>				
1,1	Kayu Bulat (m3)	63.038,63	2.249,84	2.566,26	2.022,00
1,2	Kayu Gergajian (m3)	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.296,00
1,3	Kayu Olahan (m3)	1.065,12	22.783,69	7.505,71	6.434,00
1,4	Produksi kayu hutan rakyat (m3)	149.278,22	69.085,70	95.420,08	92.158,89
<b>2</b>	<b>Hasil Hutan Ikutan</b>				
2,1	Bambu (batang)	127.330	4.822.205	13.500.256	13.510.000
2,2	Kayu Putih				
2.2.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	5.358,25	4.384,75	4.599,00	4.415,00
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	39.323,00	40.353,00	42.317,00	40.160,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	12.487.226.500	9.748.040.000	12.170.672.000	10.550.032.000
<b>3</b>	<b>Luas Lahan Reboisasi</b>				
3,1	Target (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00
3,2	Realisasi (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00
<b>4</b>	<b>Luas Lahan Penghijauan</b>				

No	Sub Elemen	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
4,1	Pembuatan Baru (ha)	574,00	30,00	278,22	375,00
4,2	Pemeliharaan (ha)	0,00	n/a	30,00	10,00
<b>5</b>	<b>Industri Pengolahan Hasil Hutan (unit)</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>6</b>	<b>Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>442.600,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Rasio pemanfaatan sumber daya hutan</b>	<b>86,70</b>	<b>85,66</b>	<b>86,68</b>	<b>86,68</b>

(Sumber : DLHK DIY, 2022)

Tabel 11 Ketercapaian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

No	Program Sesuai RPJMD DIY 2017 - 2022	Program Sesuai Kepmendagri 50	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	2018	2019			2020			2021			2022		
						Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase	Target	Realisasi	Prosentase
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	Batang	n/a	325000	580648	178,66	330000	442600	134,12	340000	357280	105,08	350000	350000	0
2	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Rasio	n/a	86,62	86,66	100,05	86,64	86,66	100,02	86,65	86,68	100,03	86,66	86,68	100,02%
3	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan tertata	%	n/a	87,4	88,03	100,72	89,4	88,03	98,47	90,68	91,04	100,40	92,32	93,7	101,49%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		n/a													
			Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	n/a	2	9,76	488,00	2	0	0,00	2	4	200,00	2	2	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase hutan konservasi terkelola	%	n/a	75,86	75,91	100,07	76,62	76,67	100,07	76,97	76,97	100,00	77,09	81,96	106,32%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh program pendukung sasaran sudah memenuhi target dan jika dikaitkan dengan *outcome* indikator sasaran juga sudah memenuhi target, maka dapat diinterpretasikan tidak terdapat kesenjangan/gap pelayanan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan di periode RPJMD berikutnya antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan hutan rakyat sebagai bagian dari fungsi ekonomi dan fungsi ekologi

Berdasarkan hasil kajian Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (2022) yang dilaksanakan oleh Bidang Planologi dan Produksi Hutan, diperoleh informasi bahwa potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) hutan rakyat di DIY lebih besar dan bervariasi. Hal ini dikarenakan luas hutan rakyat di DIY lebih besar daripada luas kawasan hutan negara. Potensi HHBK tersebut antara lain: madu, empon-empon, jamur, gula aren, dll. Namun data berseri mengenai HHBK di DIY masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap hutan rakyat untuk menjangkau tidak hanya data produksi kayu tetapi hingga produksi non kayunya. Diharapkan hal tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membuka peluang pemanfaatan hutan rakyat yang lebih luas dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat petani hutan.

Sementara jika ditinjau dari fungsi ekologi, hutan rakyat memiliki manfaat yang sangat penting antara lain perbaikan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), mengurangi angka kekritisasi lahan melalui konservasi air dan tanah serta perbaikan mutu lingkungan secara keseluruhan. Akan tetapi, manajemen pengelolaan lahan hutan rakyat masih bersifat mandiri oleh masing-masing pemilik lahan dan belum memiliki metode pengelolaan yang teratur. Setiap keluarga petani hutan rakyat merupakan satu – satunya pengambil keputusan dalam manajemen pengelolaan lahan mulai dari jenis tanaman yang dibudidayakan, sistem pengelolaan yang diterapkan, dan sistem pemanenannya yang masih terbangun. Oleh karena itu, DLHK DIY selaku pemangku kepentingan utama sektor kehutanan di DIY harus lebih intensif menggandeng para petani hutan rakyat untuk pengelolaan hutan rakyat yang lebih berkelanjutan.

- b. Adanya potensi kerusakan hutan sebagai akibat dari aktivitas wisata di sekitar kawasan hutan

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, pengembangan wisata alam diarahkan dengan konsep ekowisata dimana harus terjadi keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pemanfaatannya. Namun realitas yang saat ini terjadi, pasca melejitnya ekowisata bertema kehutanan seperti di Alas Mangunan, masyarakat ramai – ramai ingin mengelola usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan secara kemitraan namun tidak diikuti dengan kesiapan dan persyaratan yang dibutuhkan.

- c. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari

Kawasan hutan yang dibebani fungsi produksi yang dikelola dengan baik secara simultan akan memberikan kemanfaatan ekologis. Oleh karena itu kualitas hutan produksi secara gradual akan terus ditingkatkan. Tanah kosong/tidak produktif dan lahan kritis di dalam kawasan merupakan masalah pelik yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem kawasan hutan secara keseluruhan. Penanganan area tersebut seharusnya menjadi prioritas pengelolaan untuk memperbaiki kualitas sumberdaya hutan secara keseluruhan



**Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY**

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup*	n/a	38.244.308.160	15.012.288.587	65.742.942.880	80.961.216.165	n/a	26.094.811.823	13.673.926.092	59.749.938.895	75.750.653.567	n/a	0,68	0,91	0,90	0,93		
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	n/a	11.487.775.700	7.918.102.580	13.260.120.300	11.891.131.041	n/a	10.358.204.584	7.087.117.824	12.054.798.574	10.598.745.687	n/a	0,90	0,89	0,90	0,89		
3.	Urusan Keistimewaan	n/a	n/a	216.660.000	3.679.767.000	3.588.424.750	n/a	n/a	209.460.400	3.361.354.256	3.463.521.793	n/a	n/a	0,96	0,91	0,96		

\*Termasuk Urusan Pendukung

Berdasarkan Tabel 12, rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan baik. sementara pada tahun 2020 – 2022 kurang baik. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. *Force Majeur* akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada kurun waktu 2020 – 2021 yang kemudian diikuti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga beberapa subkegiatan tidak dapat terselenggara dengan baik. Selain itu dilakukan beberapa kali *refocussing* dan rasionalisasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid -19

2. Prosedur/mechanisme

Hal ini berkaitan dengan proses perencanaan hingga penatausahaan keuangan misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan, keterlambatan dalam proses lelang, dan kurangnya pengampu dalam mengantisipasi tahapan penyelenggaraan kegiatan sehingga beberapa kegiatan menjadi kurang maksimal dalam eksekusinya

3. Jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia)

Dari sisi SDM, DLHK DIY mengalami kondisi yang dianalogikan sebagai “*aging population*” yakni ketika jumlah PNS berusia di atas 50 tahun lebih dari separuh populasi keseluruhan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat karakteristik pekerjaan di DLHK DIY yang membutuhkan SDM lebih banyak di lapangan serta ritme kerja di pemerintahan yang semakin cepat mengharuskan SDM untuk terus meningkatkan kompetensi *hardskill* dan *softskill*-nya. Apalagi Indonesia menuju era disrupsi yang menuntut birokrasi yang *agile*, yaitu birokrasi yang harus cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi sembari meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan	Peluang
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan</li> <li>b. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air</li> <li>c. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan</li> <li>d. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana.</li> <li>e. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca</li> <li>f. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan</li> <li>g. Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 mensyaratkan untuk ketaatan aspek pengendalian pencemaran air 100% menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya usaha dan/atau kegiatan untuk membuat sistem pembuangan air limbah yang memadai</li> <li>h. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah</li> <li>i. Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.</li> <li>j. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.</li> <li>k. Penanganan dan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 serta transisi menuju new normal</li> <li>l. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 melalui pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>b. Adanya komitmen pemkab/pemkot di wilayah DIY dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayahnya</li> <li>c. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan</li> <li>d. Kondisi geografis DIY yang unik dan statusnya sebagai kota pelajar merupakan peluang besar bagi para akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mitigasi dan antisipasi bencana alam</li> <li>e. Pemerintah Pusat (Kemenkeu) bekerja sama dengan UNDP akan memperluas implementasi penandaan anggaran untuk perubahan iklim (Climate Budget Tagging/CBT) kepada 6 pemda di tahun 2021, salah satunya DIY. CBT merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan resiko perubahan iklim</li> <li>f. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan budaya. Hal ini menjadi peluang bagi Pemda DIY untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup</li> <li>g. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah menjadi payung hukum pemerintah daerah dalam pencegahan penurunan kualitas dan kuantitas air</li> <li>h. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 yaitu pemberlakuan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya roda 4</li> <li>i. Tingginya antusiasme dan aksi swadaya warga masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya dalam mendirikan TPS3R dan Bank Sampah</li> <li>j. Potensi leverage pendapatan masyarakat, PDRB dan iklim investasi di DIY dari sektor ekonomi sirkular</li> </ul>

Tantangan	Peluang
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya luas pemanfaatan hutan sementara masih terdapat area lahan tidak produktif dan lahan kritis dalam kawasan</li> <li>b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi wisata dan jasa lingkungan.</li> <li>c. Penyelenggaraan rehabilitasi belum direncanakan secara baik dalam satu kesatuan pengelolaan</li> <li>d. Tingginya tekanan masyarakat desa hutan untuk pemenuhan lahan pertanian, hijauan pakan ternak, kayu bakar, dan kayu pertukangan</li> <li>e. Perlindungan dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun dalam kerangka yuridis legal formal yang kuat, kejelasan hak dan kewajiban, dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.</li> <li>f. Pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara konvensional seperti belum digunakannya bibit unggul, belum diterapkannya teknik silvikultur sesuai kaidah teknik kehutanan.</li> <li>g. Pemasaran hasil hutan kayu rakyat (<i>market chain</i>) terlalu panjang, dan masih dalam bentuk log/kayu bulat, sehingga petani hutan rakyat tidak menikmati manfaat yang seharusnya dari hasil hutan rakyat</li> <li>h. Kelembagaan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) belum tertata dengan baik yang dapat berpengaruh pada posisi tawar petani hutan rakyat.</li> <li>i. Masih rendahnya kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan terhadap PDRB.</li> <li>j. Tahapan pengelolaan hutan belum dilakukan secara baik berlandaskan pada prinsip “Pengelolaan Hutan Lestari”</li> <li>k. Masa panen kayu yang lama mengakibatkan produktivitas hutan menurun drastis pasca penebangan</li> <li>l. Masih minimnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan konservasi</li> <li>m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasio pemanfaatan hutan</li> <li>b. Pelibatan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan seiring lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</li> <li>c. Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL), serta dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT-RHL)</li> <li>d. Pengembangan/pemanfaatan jasa lingkungan- ekowisata di kawasan hutan negara dan hutan rakyat sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat desa hutan</li> <li>e. Dukungan kebijakan pemerintah pada kegiatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dan/atau pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema kerjasama/ kemitraan dan perhutanan sosial</li> <li>f. Pengembangan komoditi unggulan setempat berbasis karakteristik lokal seperti nangka, bambu, dan hutan serbaguna dan pengembangan ASDG (Areal Sumber Daya Genetik) melalui penyediaan bibit berkualitas</li> <li>g. Adanya inisiasi untuk pengolahan kayu hasil hutan rakyat menjadi produk setengah jadi (<i>sawmill</i>) atau produk jadi (<i>furniture</i>) seperti di UMHR Wonolestari Bantul</li> <li>h. Adanya pendampingan dari pihak terkait termasuk LSM bagi UMHR dalam meraih sertifikasi, misalnya SLVK dan PHBML untuk menaikkan posisi tawar</li> <li>i. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah melalui kegiatan pemanfaatan HHK/pemanenan Tegakan GNRHL</li> <li>j. Balai KPH Yogyakarta mulai menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan hutan lestari seperti penyusunan rencana pengelolaan hutan, tata hutan hingga tingkat petak, rehabilitasi dan intensifikasi tegakan hutan, perlindungan hutan, konservasi plasma nutfah serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan</li> <li>k. Optimalisasi produktivitas hasil hutan bukan kayu khususnya minyak kayu putih melalui penanaman/pembongkaran tegakan tanah kosong dan pengkayaan (penambahan jumlah tanaman) untuk perbaikan kondisi tegakan menuju tegakan normal.</li> <li>l. Ditetapkannya Cagar Biosfer Merapi, Merbabu, Menoreh pada tahun 2020 yang wilayahnya meliputi Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Suaka Margasatwa Sermo sebagai zona</li> </ul>

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
	inti, berikut kawasan di sekitarnya sebagai zona penyangga dan zona transisi. Adanya cagar biosfer ini membuka peluang kerja sama antar daerah yang wilayah administratifnya masuk dalam cagar biosfer ini.

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang tak terelakkan dan mendesak dengan implikasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan di semua negara. Dalam dalam acara B20-G20 *Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force* pada Selasa 30 Agustus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto) pada tahun 2030 karena perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya sejak lama terhadap kesepakatan global tentang perubahan iklim melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2015, Indonesia meratifikasi Persetujuan Paris pada COP 21 UNFCC di Paris dan memasukkan komitmen tersebut ke dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Pemerintah juga menempatkan perubahan iklim sebagai isu lintas sektoral yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan cara perbaikan pengelolaan sektor kehutanan, lahan gambut, energi, transportasi, industri dan pengelolaan persampahan menjadi prioritas dalam menurunkan emisi GRK. Sementara itu, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim mencakup sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan daerah pesisir, infrastruktur dan kesehatan. Oleh karena itu, estafet upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus juga sampai kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah di level sub-nasional.

DIY dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi,

utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Emisi GRK di DI Yogyakarta secara agregat mencapai 8.305,31 Gg CO<sub>2</sub>e pada tahun 2020. Emisi GRK tahun 2017 merupakan emisi tertinggi sepanjang periode tahun 2014 – 2020. Rata-rata pertumbuhan emisi selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan mencapai 56 % dari tahun sebelumnya. Kenaikan emisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi sektor Kehutanan, Energi dan Pertanian. Pada periode tahun 2022 – 2027, Pemerintah Daerah DIY terus meningkatkan efektivitas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya dengan upaya Menyusun RPPLH tingkat Provinsi dan aksi – aksi lain yang lebih nyata untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional.

DLHK DIY selaku perangkat daerah yang membidangi sektor lingkungan hidup dan sektor kehutanan tentunya memiliki peran yang strategis dalam mengawal upaya pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan masalah yang dihadapi DLHK DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Untuk memudahkan proses pemetaan Masalah Pokok hingga Akar Masalah berikut hasil identifikasi permasalahan yang dihimpun berdasarkan hasil studi pustaka dan diskusi kelompok terumpun:

## **A. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

### **1. Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Yang Belum Optimal**

Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal ini tercermin dari tingkat ketaatan usaha/kegiatan masih rendah. Dari target tingkat ketaatan DLHK DIY tahun 2022, dari 80 usaha dan/atau Kegiatan (56,25%), terealisasi 45 usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT (56,25%) dan 35 usaha dan/atau Kegiatan TIDAK TAAT (43,75%). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - Undang NNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya, ketaatan terdiri dari 4 kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menetapkan ketaatan keempat kriteria tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Dengan terbitnya peraturan tersebut berpotensi akan semakin menurunkan persentase usaha/kegiatan yang taat. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY. Hingga tahun 2022 terdapat 185 unit usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY, terdiri dari: 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit, hotel; 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu; serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

## **2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang Belum Optimal**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021, target pengurangan sampah DIY sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai 31 Desember 2022 baru tercapai 20,79% dan penanganan sampah baru mencapai 47,94%. Hal tersebut masih di bawah target Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah. Salah satu penyebab upaya penanganan dan pengurangan sampah yang belum optimal adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lemahnya penegakan peraturan. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai di tingkat kalurahan. Berdasarkan hasil kajian Profil TPS3R, untuk memenuhi target Jakstrada diperlukan setidaknya 109 unit TPS3R di DIY, sementara menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) diketahui hanya terdapat 64 unit TPS3R yang terbangun, 55 unit aktif sedangkan 9 unit lainnya tidak aktif. Sementara jumlah unit bank sampah di DIY total terdapat 1.279 unit, terdiri dari 237 unit di Kabupaten Sleman, 614 unit di Kota Yogyakarta, 78 unit di Kabupaten Gunungkidul, 123 unit di Kabupaten Kulon Progo dan 227 unit di Kabupaten Bantul. Pengelola sampah mandiri tersebut masih perlu dioptimalkan perannya dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Berdasarkan dokumen OBC<sup>6</sup>, komposisi sampah yang masuk ke TPA

---

<sup>6</sup> Outline Business Case for Piyungan Waste Processing and Landfill (CRISIL, 2020) merupakan dokumen persiapan KPBU TPA Piyungan



Piyungan terdiri dari sampah organik 45,63 %, sampah anorganik yang dapat didaurulang 45,47% dan sisa/residu 8,90 %. Berdasarkan Laporan Studi Peningkatan Kinerja TPA Regional Piyungan Kab. Bantul (2017), dengan luas landfill 72.620,832 m<sup>2</sup> dan rencana tinggi 34 m maka kapasitas maksimalnya adalah 864.187,9 m<sup>3</sup>. Apabila dibandingkan dengan hasil proyeksi volume sampah yang dikompaksi maka volume tersebut tercapai pada tahun 2019. Namun hingga tahun 2022, TPA Regional masih dimanfaatkan untuk menampung sampah dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan terus mengoptimalkan daya tampung, menambah luas area landfill dan menambah sarana dan prasarana penataan sampah.

### 3. Rendahnya Kualitas Air

Pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik, yaitu Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY.

Tabel 13 Status kualitas air sungai DIY Tahun 2022

No.	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	Keterangan
1.	Bedog	5,45 – 10,33	Cemar sedang – cemar berat
2.	Belik	3,62 – 11,90	Cemar ringan – cemar berat
3.	Bulus	4,54 – 8,05	Cemar ringan – cemar sedang
4.	Code	3,06 – 22,84	Cemar ringan – cemar berat
5.	Gajahwong	3,66 – 12,38	Cemar ringan – cemar berat
6.	Kuning	3,17 – 9,37	Cemar ringan – cemar sedang
7.	Konteng	6,82 – 11,94	Cemar sedang – cemar berat
8.	Oyo	5,24 – 7,73	Cemar sedang
9.	Tambakbayan	5,28 – 16,08	Cemar sedang – cemar berat
10.	Winongo	3,57 – 9,85	Cemar ringan – cemar sedang

Sumber: IKPLHD DIY, 2022

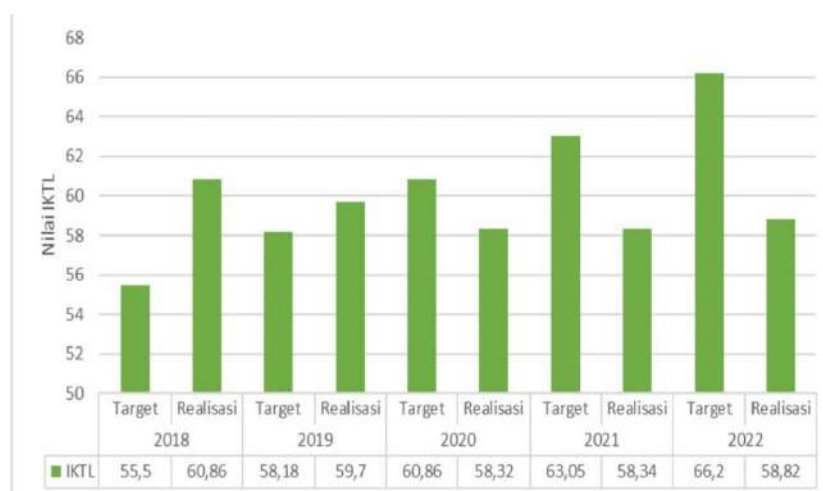
Berdasarkan IP di atas, dengan jumlah data titik pantau sebanyak 271 titik diperoleh nilai IKA di DIY pada tahun 2022 sebesar 32,14. Nilai tersebut belum memenuhi target tahun 2022 yang merupakan akhir periode RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 sebesar 42,50. Faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas air sungai adalah sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun peternakan dan UMKM

2. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar
3. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap
4. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak
5. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai
6. Peningkatan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga

#### 4. Rendahnya Tutupan Vegetasi

Capaian IKTL mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi IKTL ditahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,34 ditahun 2021 dan di tahun 2022 IKTL meningkat sedikit menjadi 58,82. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL tersebut maka upaya membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018 – 2022 sebagaimana grafik berikut ini:



Gambar 6 Data capaian IKTL DIY 2018 - 2022

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa penetapan target IKTL cenderung meningkat drastis tiap tahun sementara realisasi relatif mendatar. Berdasarkan kondisi di lapangan, luas wilayah DIY tidak dapat bertambah sementara jumlah penduduk berikut aktivitas ekonominya terus meningkat sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada hal yang harus trade-off

## **B. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

DIY memiliki luas hutan sebesar 98.396,53 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 19.133,95 ha dan hutan rakyat seluas 79.262,58 ha. Hutan negara sendiri terbagi menjadi hutan konservasi seluas 3.316,87 ha, hutan produksi seluas 13.519,47 ha, dan hutan lindung seluas 2.297,61 ha. Sedangkan hutan rakyat tersebar di Kabupaten Gunungkidul seluas 54.548,904 ha, Kabupaten Kulon Progo seluas 12.338,347 ha, Kabupaten Sleman seluas 2.469,518 ha, dan Kabupaten Bantul seluas 9.905,811 ha. Dibandingkan dengan luas DIY, maka luas hutannya mencapai 30,88%.

### **1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Yang Masih Rendah**

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 91 Kalurahan yang terletak di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan sehingga kehidupan masyarakatnya bergantung atau memiliki ikatan erat dengan hutan di sekitarnya. Berdasarkan data dari aplikasi Dataku Bappeda DIY, per tahun 2022 Indeks Gini DIY adalah 0,439, lebih besar dari nilai Indeks Gini nasional sebesar 0,384. Angka ini menunjukkan bahwa DIY masih menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yang terus meningkat.

Perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses secara legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan dalam rangka pengelolaan konflik tenurial. Pemerintah DIY melalui Balai KPH Yogyakarta telah mengalokasikan 1565,88 ha kawasan hutan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial, antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Berdasarkan Keputusan Menteri LHK tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII tertanggal 31 Desember 2021 untuk wilayah DIY pemberian izin pengelolaan hutan ditargetkan seluas 3.561 ha sehingga masih perlu dilakukan penambahan izin kurang lebih 1.995,12 ha.

Jumlah perhutanan sosial di DIY sampai dengan tahun 2022 45 KTH, terdiri dari HKm dan HTR. Pada periode tahun 2022 – 2027, Perhutanan Sosial akan diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas Kelola KTH untuk mempertahankan jumlah yang ada karena kondisi KTH HKm dan HTR masih belum sepenuhnya aktif dan mandiri, melalui kemudahan dalam investasi/kemitraan, peningkatan produksi komoditas bernilai tambah ekonomi, dukungan promosi serta pemasaran produk – produk perhutanan sosial.

## 2. Belum Optimalnya Penanganan Lahan Kritis

Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Hingga tahun 2022 penanganan lahan kritis yang dilakukan di DIY baru mencapai 5,655%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Penanganan lahan kritis 2018 - 2022

Tahun	Luas lahan kritis provinsi yang direhabilitasi (ha)	Keterangan
2018	311,04	
2019	1099	
2020	985,42	
2021	922,22	
2022	1156,5	41,5 ha dari APBD DLHK DIY, 565 ha KBR, 550 penanaman RHL oleh BPDAS di area KPH Yogyakarta dan KPHK Bunder
<b>Total</b>	<b>4474,18</b>	
<b>Luas Lahan kritis DIY menurut SK Menteri LHK Nomor 306 tahun 2018</b>	<b>79.123 ha</b>	
<b>Persentase penanganan Rehabilitasi</b>	<b>5,655%</b>	

## 3. Peran Sektor Kehutanan sebagai *Nature Sanctuary*

DIY sebagai salah satu wilayah yang memiliki keragaman habitat tinggi memiliki beberapa kawasan konservasi yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

kawasan konservasi pemerintah dan juga kawasan konservasi non pemerintah. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Alasan dari yang wilayah dilindungi ini adalah karena karena nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan sosial budayanya, atau karena hal-hal lain yang serupa dengan itu. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kawasan konservasi secara umum mencakup dua kelompok besar, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, bertujuan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**Tabel 15 Kawasan Konservasi di DIY**

No.	Nama	Lokasi Administrasi	Luas (ha)	Pengelola
1.	Cagar Alam Imogiri	Wukirsari dan Girirejo, Kec. Imogiri, Kab. Gunungkidul	11.820	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
2.	Suaka Margasatwa Paliyan	Kec. Paliyan, Gunungkidul	434.834	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
3.	Suaka Margasatwa Sermo	Kulon Progo	184.900	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
4.	Cagar Alam Batu Gamping	Ambarketawang, Gamping	1.069	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
5.	Taman Nasional Gunung Merapi	Kec. Turi	1.728	Balai Taman Nasional Gunung Merapi
6.	Taman Hutan Raya Bunder	Playen, Kab Gunungkidul dan Imogiri Kab. Bantul	634	Balai Tahura Bunder (DLHK DIY)
7.	KBAK Gunung Sewu	Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul	65.418,95	Pemkab. Gunungkidul dan Pemkab. Bantul (DIY),

No.	Nama	Lokasi Administrasi	Luas (ha)	Pengelola
				Pemkab. Pacitan (Jawa Timur)
8.	Gumuk Pasir	Parangtritis, Kretek, Bantul	430	Pemkab. Bantul

Sumber: Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati (2022)

Di tengah gempuran alih fungsi lahan, menurunnya kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim, kawasan konservasi menjadi tempat teraman bagi kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada. Apalagi di tengah isu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang membayangi DIY sehingga prioritas perlindungan flora dan fauna dan pengelolaan kawasan konservasi menjadi semakin tersingkirkan.

Untuk dapat mengadvokasi perlunya pengelolaan kawasan konservasi kondisi eksisting kawasan harus dapat dikuantifikasi. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen yang dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dapat dipergunakan sebagai metode untuk menilai sejauh mana tingkat pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya pengukuran tersebut dapat memotivasi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Tahura Bunder sebagai satu – satunya kawasan konservasi yang dikelola oleh DLHK DIY pada tahun 2021 memperoleh nilai efektivitas pengelolaan 70.<sup>7</sup> Nilai ini termasuk sedang dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

#### **4. Tindak Lanjut Penerapan Tata Kelola Hutan Lestari**

Pada periode tahun 2022 – 2027, perbaikan tata Kelola hutan produksi sudah mulai dirintis dilakukan; antara lain perencanaan teknis tahunan, penyelesaian konflik, penyelesaian tumpang tindih penggunaan Kawasan, dan perbaikan pengelolaan hutan produksi pada tingkat tapak. Melalui upaya tersebut kualitas tutupan hutan pada hutan produksi diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi ekonomi kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal

<sup>7</sup> Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2022 tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Sampai Dengan Tahun 2021

dari Kawasan hutan. DLHK DIY telah mengambil berbagai upaya untuk memfasilitasi pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerja sama dengan masyarakat, seperti pengembangan Hutan Wana Wisata Budaya Mataram yang berada di wilayah RPH Mangunan (2017), Watu Payung, Kalibiru, dll. Pada tahun 2022 DLHK DIY juga bekerja sama dengan WWF telah merintis adanya pengadaan berkelanjutan untuk mendukung penguatan sistem SLVK dan SIPUHH dan memberikan benefit kepada pemegang izin usaha yang taat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dibuat pemetaan masalah dengan mengkategorisasi item permasalahan berdasarkan hubungan sebab akibat dan besar/kecil ruang lingkup yang dipengaruhi. Adapun hasil pemetaan masalah urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 16 Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum</li> <li>b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup</li> </ul>
	2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah</li> <li>b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat usaha/kegiatan dan masyarakat umum</li> <li>c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan</li> <li>d. Terbatasnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup</li> </ul>
	3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di DIY karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan</li> </ul>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		<p>penangannya</p> <p>b. Belum terpenuhinya kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (standar mutu dan akreditasi) dan kuantitas (sarana dan prasarana serta jumlah SDM)</p>
	4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	<p>a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.</p> <p>b. belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber menyebabkan tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA</p>
	5. Penyesuaian era new normal, perbaikan tata Kelola ekonomi pasca pandemi dan antisipasi terhadap kondisi <i>Force Majeur</i> kesehatan di masa depan	<p>a. Munculnya permasalahan lingkungan yang berdampak pada SDM belum dapat diantisipasi secara cepat dan optimal</p> <p>b. Berpengaruhnya terhadap optimalisasi kinerja karena keterbatasan aktivitas kerja</p> <p>c. Menurunnya tingkat kesehatan lingkungan mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat juga menurun</p> <p>d. Perlunya penyesuaian terhadap sistim kerja dan sistem penganggaran yang berdampak pada perubahan fokus program kegiatan</p>
2. Belum optimalnya kinerja tata Kelola hutan lestari	1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal</p> <p>c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibirikan lahan dan/atau okupasi lahan</p>
	2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di DIY belum optimal	<p>a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal</p> <p>b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan</p>



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		alam maupun manusia c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
	3. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi	a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal
	4. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas c. Keterbatasan kapasitas SDM untuk pengembangan bibit tanaman
	5. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap gangguan c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam d. Tingginya alih fungsi lahan di DIY e. belum adanya manajemen pengelolaan DAS yang terintegrasi antar stakeholders

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan

Daerah. Visi Gubernur DIY Periode 2022 – 2027 adalah

*“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”*

Pancamulia sebagai Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 merupakan Visi Dasar yang nantinya akan menjadi rujukan dalam menyusun RPJPD 2025 – 2045. Visi Dasar ini juga ditujukan untuk menganyam keberlanjutan Visi RPJPD 2022 – 2025 dengan visi RPJPD 2025 – 2045 mengingat kurun waktu 2022 – 2027 merupakan kurun waktu dimana RPJMD akan berada di tengah waktu berakhirnya RPJPD 2005 – 2025.

Sementara Misi merupakan turunan visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Adapun Misi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Arah pembangunan lingkungan hidup di DIY ditujukan untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada, khususnya menyangkut 5 hal yakni: pengendalian pencemaran lingkungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pencapaian kesepakatan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon serta pengurangan resiko bencana.

DLHK DIY secara hierarkhi mendukung ketercapaian 3 misi, yaitu misi ke 1, 2 dan 4. Untuk mendukung ketercapaian Misi ke-1 melalui Tujuan Terwujudnya Kualitas Hidup-Kehidupan-Penghidupan Masyarakat dan Sasaran Kualitas SDM Yogyakarta yang Dapat Diandalkan, DLHK DIY mengemban peran dalam Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup khususnya Program Pengelolaan Persampahan. Misi ke-2 diuraikan menjadi Tujuan Pemda Mengecilnya Ketimpangan Wilayah dan Sasaran Pemda Meningkatkan Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju, didukung oleh Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan khususnya melalui Program yang terkait Perhutanan Sosial. Sedangkan Misi ke-4 yang diuraikan menjadi Tujuan Pemda Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lebih Baik dan Sasaran Pemda Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Kabupaten/Kota**

#### **a. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan langkah – langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Sasaran strategis akan dicapai KLHK pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim** dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*)
- 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan** dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB

Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Penilaian nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK

3. **Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan** dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria); (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
4. **Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing** dengan indikator yaitu: (1) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan; (2) Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang inovatif dan/atau implementatif; (5) Nilai kinerja reformasi birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

**Tabel 17 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK**

No.	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup</li> <li>2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan</li> <li>3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur DIY mengenai pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>3. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan DIY dalam RPJMD DIY 2017 - 2022</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan</li> <li>2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan</li> <li>3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
		<p>4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>		
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Luasan hutan negara di DIY sangat terbatas Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal	Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah pusat mendorong KPH untuk terus eksis dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi memberikan dampak positif Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat	<p>Valuasi keberhasilan pengelolaan hutan dengan hanya mendasarkan pada produksi kayu saja sangat sulit diterapkan di DIY</p> <p>Masih kurangnya keterlibatan pemerintah di level tapak, khususnya pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan seiring dengan penerapan paradigma perhutanan sosial, dan pemberlakuan UU Desa</p>

No.	Sasaran Strategis Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
			memberikan dampak positif	
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola hutan	Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan oleh dinas	Masih adanya ego sektoral di sebagian pihak terkait (khususnya antar SKPD di lingkup pemerintah daerah) dalam pendampingan dan pemberdayaan petani hutan rakyat.
4.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Masih belum optimalnya penanaman semangat inovasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	Ketersediaan SDM LHK yang mencukupi	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan inovasi belum terlalu gencar disosialisasikan kepada SKPD

### b. Renstra DLH Kabupaten/Kota

Tabel 18 Faktor - faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis Renstra DLH Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
Renstra DLH Kab. Kulon Progo 2017 -2022				
1.	Meningkatnya konservasi perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup</li> <li>Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan</li> <li>Belum optimalnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi tutupan vegetasi yang masih relative luas termasuk Kawasan mangrove</li> <li>Kebijakan beladani dan beli kulon progo yang dapat mendukung penurunan carbon footprint</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya alih fungsi lahan karena aktivitas bandara baru di Kulon Progo</li> <li>Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan</li> <li>Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan</li> <li>Aktivitas</li> </ol>

No	Sasaran Strategis Renstra DLH Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan di DLHK DIY	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
		koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		penambahan galian C yang kurang terkontrol
Renstra DLH Kab. Bantul 2017 – 2021				

1.	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung profesionalisme kinerja instansi	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Kebijakan “Bantul bebas sampah” oleh Bupati Bantul	1. Pengelolaan TPST piyungan yang masih belum ideal
2.	Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup	2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan	2. Potensi pemanfaatan sumber energi terbarukan	2. Fungsi pengawasan lingkungan hidup yang masih belum optimal
3.	Peningkatan luas tutupan lahan	3. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	3. Dukungan pemerintah terhadap eksistensi bank sampah	3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
4.	Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			

Perubahan Renstra DLH Kab. Sleman 2017 - 2021

1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Keberadaan institusi akademis yang banyak di Kab Sleman	1. Peningkatan aktivitas alih fungsi lahan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2. Adanya kebijakan Kawasan pertanian berkelanjutan	2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penentuan kebijakan
3.	Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup			3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat khususnya masalah sanitasi
4.	Meningkatnya pelayanan dan penyediaan			



	prasarana dan sarana sanitasi			
Renstra DLH Kab. Gunungkidul 2017 - 2022				
1.	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi wisata berbasis ecotourism</li> <li>2. Potensi sumber air bawah tanah</li> <li>3. Tutupan vegetasi yang cukup baik yang disumbang dari luasan hutan rakyat dan hutan negara</li> <li>4. Pengembangan pasar ekologi sebagai upaya pemanfaatan lahan bekas tambang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kunjungan wisata di Kab. Gunung Kidul menimbulkan masalah lingkungan baru</li> <li>2. Timbunan sampah yang belum terkelola dengan baik</li> <li>3. Penambangan batu kapur di Kawasan karst yang cukup massive</li> </ol>
Renstra DLH Kota Yogyakarta 2017 - 2022 (Reviu Th.2020)				
1.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	1. Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Adanya Perwal terkait kebijakan RTH, dan pengelolaan sampah ditingkat kelurahan	1. Pembangunan property yang cukup tinggi dengan dalih peningkatan aktifitas pariwisata
2.	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Meningkat	2. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2. Penataan Kawasan sempadan sungai	2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
3.	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	3. Akibat alih fungsi lahan 3. Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039, penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun strategi RTRW DIY yang memiliki keterkaitan dengan ketugasan DLHK DIY adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus, terdiri atas: Melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus; Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya; dan Mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
2. Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, terdiri atas: Memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. mengembangkan pelabuhan; Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air; Mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah; Mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan Mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi, dan sumber daya di kawasan perkotaan.
3. Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan, terdiri atas: Menetapkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan; Melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah; Melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan

mengembangkannya sebagai wisata minat khusus; Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan; Mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan Mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat

Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. DLHK DIY memiliki kepentingan dalam mendukung sistem jaringan prasarana wilayah khususnya dalam hal:

1. Sistem Konservasi pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku terdiri atas: 1. Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo; 2. embung atau telaga di semua wilayah DIY; 3. pembangunan dan pengembangan bendung; 4. sistem resapan air hujan; 5. sistem pengendalian banjir sungai yang berada di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Aliran Sungai Opak, Daerah Aliran Sungai Serang; 6. pengendalian banjir lahar pada sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi; 7. pengendalian pengambilan air tanah; dan 8. pembangunan waduk atau bendungan baru.
2. Sistem Jaringan Pengolahan Air Limbah
  - a. Pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kec. Sewon dan Kec. Pleret, Kab. Bantul.
  - b. Pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kec. Wates, Kab. Kulon Progo; Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul; dan Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
  - c. Pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kawasan di Kec. Berbah, Kec. Ngaglik, dan Kec. Gamping Kab. Sleman, Kec. Temon dan Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo;
  - d. Pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional dan/atau kota di seluruh kabupaten dan kota;
  - e. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja di seluruh

kabupaten dan kota; dan

f. Pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

3. Sistem Jaringan Persampahan di DIY akan diarahkan untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan. Selain itu juga melakukan pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R dan tempat penampungan sementara 3R terpadu untuk mendukung sistem 3R di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kec. Piyungan, pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah di Kec. Nanggulan dan Kec. Pengasih, dan tempat pemrosesan akhir sampah di Kec. Wonosari.

Berdasarkan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2022 – 2027 DLHK DIY merupakan salah satu OPD yang mengampu capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun target yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Analisis TPB yang diampu DLHK DIY dalam KLHS

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	20 27
<b>6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>								
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air danau	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	41. 72 4	42. 79 2	43. 86	44 .9 28
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Sudah dilaksanakan, belum mencapai target	Belum meningkat	31. 57	30. 10	28. 63	27 .1 6

Target	Indikator	Baseline Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					2024	2025	2026	2027
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada (1 WS)	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	1 (SISDA)	1 (SISDA)	1 (SISDA)	1 (SISDA)
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS		Tidak ada					
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Ada	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapa	14	14	14	14
Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	Berkurang	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	0	0	0	0
<b>9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>								
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Menurun	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	42,271	41,204	40,137	39,077
Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan	Menurun	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	2,72	2,72	2,47	2,34

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	20 27
lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing	peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing							
<b>11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>								
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Tidak ada data					
<b>12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>								
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	14,475.4	16,121.7	17,768.0	19,19.143
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target		187,570.2	209,903.0	232,235.8	254,456.86
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Tidak ada data					
<b>15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayat</b>								
Pada tahun 2020, menjamin	Proporsi tutupan	Meningkat	Sudah	Tercapai	64,	63,	63,	64

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	20 27
pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	hutan terhadap luas lahan keseluruhan	kat	dilaksanakan, sudah mencapai target		24 2	08 8	93 4	,7 8
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya		Tidak ada data					
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	86, 76 25	86, 79	86, 81 75	86 ,8 45
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Meningkat	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapai	1	1	1	1
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurang	Sudah dilaksanakan, sudah mencapai target	Tercapa	24. 5	6.4	0	0
Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian		Tidak ada data					

Target	Indikator	Baselin e Tahun Dasar	Capaian	Gap	Target Capaian			
					20 24	20 25	20 26	20 27
	keuntungan yang adil dan merata.							
Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati		Tidak ada data					

Sumber : KLHS (2022)

DLHK DIY memiliki 20 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang perlu untuk diisikan, hasil analisis dari capaian tersebut terdapat 12 indikator (60%) yang capaiannya sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, indikator tersebut diantaranya yaitu Kualitas air danau., Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. dan beberapa indikator lainnya. Selanjutnya terdapat 1 indikator (5%) yang capaiannya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, indikator tersebut adalah Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Kemudian terdapat sebanyak 6 indikator (30%) yang capaiannya tidak ada data, indikator tersebut yaitu indikator Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS., Persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.. Diharapkan indikator untuk DLHK DIY yang memiliki capaian sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dapat dicapai dalam 5 tahun mendatang dan untuk indikator yang belum memiliki data agar kedepannya data tersebut dapat tersedia.

### 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas



pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis DLHK DIY didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) gambaran pelayanan DLHK DIY; (2) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; (3) hasil telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah; (4) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

#### 1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan adanya pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem misalnya ekosistem hutan dan perairan, dan punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

#### 2. Tingginya Timbulan Sampah

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah masih bersifat jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing - masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Piyungan yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah regional di DIY. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

### 3. Menurunnya kualitas air;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek – aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian; pencemaran bakteri coli dari aktivitas peternakan mengakibatkan adanya penurunan kualitas air, khususnya air sungai. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Air yang terus menurun dari tahun ke tahun<sup>8</sup>.

### 4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan

Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi karena aktivitas wisata dan pendidikan di perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kepadatan arus lalu lintas. Adanya transportasi massal sudah menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai salah satu sarana untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan juga turut memperburuk kualitas udara, dimana polutan yang dihasilkan dari transportasi dan industri tidak ada media penetralisirnya.

### 5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Belum efektifnya instrumen penataan dan penegakan hukum lingkungan menyebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap kaidah – kaidah yang ditentukan dalam dokumen perizinan lingkungan. Padahal dalam dokumen izin lingkungan tersebut

Penambangan bahan galian golongan C di DIY sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur. Pemberian izin terhadap aktivitas penambangan bahan galian golongan C sejatinya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Namun, pada praktiknya masih banyak yang belum memiliki izin sehingga sulit dikontrol dampaknya terhadap lingkungan. Dampak dari penambangan ilegal ini antara lain kerusakan ekosistem sungai dan karst, tanah longsor, berkurangnya debit

---

<sup>8</sup>Nilai IKA DIY mengalami trend penurunan sejak tahun 2018 s/d 2021, yaitu berturut – turut sebesar: 40,25; 38,65; 38,43; 35,42

air permukaan, dan pencemaran lingkungan.

#### 6. Alih fungsi lahan tinggi

Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Beberapa pelanggaran juga terjadi terhadap area hutan, sempadan sungai, dan sempadan pantai. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem seperti ekosistem sungai, karst dan gumuk pasir.

#### 7. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih rendah

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya kesulitan untuk mengakses fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memiliki penghidupan yang layak. Keterbatasan tersebut membuat mereka seringkali merambah kawasan hutan karena kurangnya pengetahuan, keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari merupakan pemanfaatan secara bijak terhadap seluruh potensi hutan baik hasil hutan kayu maupun bukan kayu, termasuk jasa lingkungan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Untuk menuju hal tersebut maka diperlukan peningkatan kapasitas dalam hal ruang lingkup kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain kelola kawasan, kelola usaha dan kelola kelembagaan

#### 8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Luas lahan kritis DIY sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018 adalah 79.123 ha. Hingga tahun 2021, luas lahan kritis yang terrehabilitasi hanya sebesar 3,42%. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar sementara pendanaan dari APBD terbatas apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mempercepat upaya penanganan lahan kritis, antara lain dengan menggunakan sumber pendanaan alternatif seperti DBH-DR, Dana Alokasi Khusus, kerjasama dan CSR. Selain itu perlu

adanya koordinasi dengan instansi pusat, instansi kabupaten/kota, dan stakeholder lainnya untuk penyediaan data khususnya data rehabilitasi lahan kritis agar data yang dilaporkan dapat lebih akurat dan mewakili kinerja.

#### 9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Untuk dapat meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, perlu ada perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari *timber oriented* menjadi *landscape management*. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Apalagi luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di DIY yang relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain sehingga jika hanya mengandalkan pada produksi primer maka tidak akan mendatangkan benefit yang maksimal. Oleh karena itu pada periode mendatang perlu diterapkan strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan, meningkatkan PNBPN pemanfaatan hutan dan mengentaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan eksistensi dan fungsi hayati hutan.

#### 10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diartikan sebagai kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologisnya (lestari). Kawasan Ekosistem Esensial memiliki bentuk kawasan yang berbeda-beda, yaitu kawasan lahan basah, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, taman keanekaragaman hayati, hingga areal konservasi yang dikelola masyarakat. Bentuk perlindungan secara terstruktur dimulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pembinaan. Salah satu bentuk perencanaan KEE adalah identifikasi dan inventarisasi areal-areal yang berpotensi sebagai KEE.

Pengelolaan KEE sudah berjalan pada beberapa lokasi di Indonesia seperti di pulau Jawa sudah ada 13 KEE yang mencapai 120.109,25 ha. Di DIY terdapat beberapa Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KEE Mangrove Baros (Kabupaten Bantul) seluas 22,7 ha, KEE Habitat Burung Migran Trisik (Kabupaten Kulon Progo) seluas 101,28 ha dan KEE Mangrove Jangkaran (Kabupaten Kulon Progo) seluas 93,67 ha. Selain itu terdapat satu kawasan yang masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan sebagai KEE yaitu Kawasan Karst Gunungkidul.

#### 11. Penataan Kawasan Hutan

Kawasan Hutan di DIY seluas 19.036,42 ha dengan kawasan yang dikelola oleh Pemda DIY seluas 15.581 ha (Balai KPH Yogyakarta) dan 771,32 (Balai Tahura Bunder) sehingga luas total 16.352,32 ha dengan panjang batas  $\pm$  511,43 km. Sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 511,43 km (100%) dan penyelesaian permasalahan tenurial 1.408,84 ha atau 99,58% dari total permasalahan seluas 1.414,73 ha.

Saat ini banyak dijumpai tanda batas kawasan dalam kondisi rusak, bergeser dari posisi sebenarnya bahkan tanda batas yang hilang sehingga batas kawasan hutan menjadi kabur atau tidak jelas. Kondisi tanda batas seperti ini banyak dijumpai pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan yang memiliki nilai tinggi secara ekonomis maupun secara sosial seperti pada lahan subur untuk pertanian, lahan strategis untuk perdagangan, lahan yang bernilai tinggi untuk pemukiman dan lahan yang berdekatan dengan akses jalan. Tidak jelasnya batas kawasan hutan menimbulkan resiko berkurangnya luas kawasan hutan, rusaknya sumberdaya hutan dan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan. Konflik tenurial terutama dengan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan tantangan utama dalam menjaga keutuhan batas dan tanda batas kawasan hutan. Konflik tenurial tersebut menimbulkan penyerobotan lahan kawasan hutan sehingga tanda batas kawasan hutan sengaja digeser atau dirusak bahkan dihilangkan.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan DLHK DIY dalam kurun waktu tahun 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :

**“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”**

### **4.2 Sasaran OPD**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator. Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah DLHK DIY beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 20 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			n/a	82,35%	85,91%	92,76%	94,33%	100%	100%
			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A
			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15%	4,61%	4,82%	5,87%	5,87%



## **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

### **5.1 Strategi**

Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup
7. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Melaksanakan pengelolaan persampahan
9. Melaksanakan pengelolaan hutan
10. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
11. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

### **5.2 Arah Kebijakan**

Secara lebih lanjut, strategi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup DIY dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi
3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4. Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
5. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan
6. Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi
7. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota
8. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi
9. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi
10. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi
11. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
12. Menangani sampah di TPA/TPST Regional
13. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
14. Menyusun rencana pengelolaan KPH
15. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung
16. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
17. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
18. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun
19. Melakukan perbenihan kehutanan
20. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi
21. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
22. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan DLHK DIY, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 21 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	<p>1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator: Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Metaindikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing - masing program bidang lingkungan hidup</p>	<p>1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup</p> <p>2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)</p> <p>4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <p>7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup</p> <p>8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup</p>	<p>a. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</p> <p>b. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi</p> <p>c. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>d. Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>e. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan</p> <p>f. Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi</p> <p>g. Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota</p> <p>h. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>i. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi</p> <p>j. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi</p> <p>k. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</p> <p>l. Menangani sampah di TPA/TPST Regional</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Melaksanakan pengelolaan persampahan	
	<p>2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari</p> <p>Indikator: Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari</p> <p>Metaindikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing - masing program bidang kehutanan</p>	<p>1. Melaksanakan pengelolaan hutan</p> <p>2. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p>	<p>a. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</p> <p>b. Menyusun rencana pengelolaan KPH</p> <p>c. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>d. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</p> <p>e. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</p> <p>f. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <p>g. Melakukan perbenihan kehutanan</p> <p>h. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi</p> <p>i. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam</p> <p>j. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p>
	<p>3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</p> <p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Metaindikator: Capaian Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun n</p>	<p>1. Melaksanakan program yang menunjang urusan pemerintah daerah provinsi</p>	<p>a. Melakukan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Melakukan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>d. Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

## BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran terkait dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif DLHK DIY disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 22 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Tercapainya perlu ndungan dan pen gelan	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	48.2 80.4 19.6 97	A	47.54 2.344 .308	A	53.46 6.004 .723	A	52.62 4.189 .198	A	54.09 7.787 .744	A	55.89 2.900 .983	A	263.6 23.22 6.956	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
laan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah																			utan an	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan	95,69	95,69	48.280.419.697	n/a	47.542.344.308	95,69	53.466.004.723	95,69	52.624.189.198	95,79	54.097.787.744	95,89	55.892.900.983	95,89	263.623.226.956	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			<b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>																<b>Hidup dan Kehutanan</b>	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94	94		94		n/a		n/a		n/a		n/a		94,24			
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	202.510.750	100%	46.565.900	100%	199.829.500	100%	134.445.000	100%	141.989.500	100%	156.188.450	100%	679.018.350		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a dokumen	n/a dokumen	66.713.000	4 dokumen	18.761.400	4 dokumen	124.879.500	4 dokumen	54.000.000	4 dokumen	56.000.000	4 dokumen	61.600.000	4 dokumen	315.240.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a dokumen	n/a dokumen	10.402.000	2 dokumen	4.383.200	2 dokumen	4.950.000	2 dokumen	5.445.000	2 dokumen	5.989.500	2 dokumen	6.588.450	2 dokumen	27.356.150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00. 01.1. 01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a laporan	n/a laporan	125. 395. 750	22 laporan	23.42 1.300	22 laporan	70.00 0.000	22 laporan	75.00 0.000	22 laporan	80.00 0.000	22 laporan	88.00 0.000	22 laporan	336.4 21.30 0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00. 01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	n/a	n/a	42.2 63.0 99.8 11	100 %	42.84 8.106 .794	100 %	44.75 0.842 .550	100 %	45.86 9.385 .819	100 %	47.01 9.866 .465	100 %	48.20 7.187 .627	100 %	228.6 95.38 9.255	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	42.133.599.811	369	42.726.366.794	369	44.604.122.750	369	45.719.225.819	369	46.862.206.465	369	48.033.761.627	369	227.945.683.455	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	100.440.000	1	100.740.000	1	113.220.000	1	114.160.000	1	119.160.000	1	131.076.000	1	578.356.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a laporan	n/a laporan	2.090.000	2 laporan	3.000.000	2 laporan	3.499.800	2 laporan	4.000.000	2 laporan	4.500.000	2 laporan	4.950.000	2 laporan	19.949.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a laporan	n/a laporan	26.970.000	14 laporan	18.000.000	14 laporan	30.000.000	14 laporan	32.000.000	14 laporan	34.000.000	14 laporan	37.400.000	14 laporan	151.400.000	Dinas Lingkungan Hidup	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Triwulanan/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																dan Kehutanan	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	62.400.000	100%	67.800.000	100%	101.400.000	100%	82.038.000	100%	90.241.800	100%	99.265.900	100%	440.745.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	62.400.000	1 laporan	67.800.000	1 laporan	101.400.000	1 laporan	82.038.000	1 laporan	90.241.800	1 laporan	99.265.900	1 laporan	440.745.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	718.595.800	100 %	502.006.500	100 %	1.121.322.134	100 %	1.250.660.500	100 %	1.312.598.500	100 %	1.443.858.300	100 %	5.630.445.934	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	42.273.200	1 Paket	52.955.000	1 Paket	68.573.000	1 Paket	57.432.000	1 Paket	59.332.000	1 Paket	65.265.200	1 Paket	303.557.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	113.984.000	1 Paket	98.471.800	1 Paket	192.869.600	1 Paket	152.527.000	1 Paket	152.695.000	1 Paket	167.964.500	1 Paket	764.527.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	152.620.000	1 Paket	75.030.300	1 Paket	143.956.600	1 Paket	174.063.000	1 Paket	181.407.000	1 Paket	199.547.700	1 Paket	774.004.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a Paket	n/a Paket	92.264.600	1 Paket	60.000.000	1 Paket	123.182.000	1 Paket	104.863.000	1 Paket	106.214.000	1 Paket	116.835.400	1 Paket	511.094.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	7.920.000	1 Dokumen	9.710.400	1 Dokumen	9.710.400	1 Dokumen	11.749.500	1 Dokumen	12.924.500	1 Dokumen	14.216.900	1 Dokumen	58.311.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	309.534.000	1 Laporan	205.839.000	1 Laporan	583.030.534	1 Laporan	750.026.000	1 Laporan	800.026.000	1 Laporan	880.028.600	1 Laporan	3.218.950.134	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	692.825.400	100%	75.459.100	100%	1.270.114.980	100%	320.106.000	100%	421.046.000	100%	463.150.600	100%	2.549.876.680	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a unit	n/a unit	296.433.500	21 unit	21.210.700	21 unit	898.941.280	21 unit	167.660.000	21 unit	293.096.000	21 unit	322.405.600	21 unit	1.703.313.580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a unit	n/a unit	396.391.900	20 unit	54.248.400	20 unit	371.173.700	20 unit	152.446.000	20 unit	127.950.000	20 unit	140.745.000	20 unit	846.563.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	2.649.211.600	100 %	2.850.760.974	100 %	3.618.700.360	100 %	2.837.973.999	100 %	2.944.743.999	100 %	3.239.218.478	100 %	15.491.397.810	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a laporan	n/a laporan	8.107.000	1 laporan	3.680.000	1 laporan	6.600.000	1 laporan	6.320.000	1 laporan	7.590.000	1 laporan	8.349.000	1 laporan	32.539.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a laporan	n/a laporan	911.534.200	1 laporan	841.334.200	1 laporan	1.268.834.200	1 laporan	818.084.200	1 laporan	823.584.200	1 laporan	905.942.700	1 laporan	4.657.779.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1.72 9.57 0.40	1 laporan	2.005 .746. 774	1 laporan	2.343 .266. 160	1 laporan	2.013 .569. 799	1 laporan	2.113 .569. 799	1 laporan	2.324 .926. 778	1 laporan	10.80 1.079 .310	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	1.69 1.77 6.33 6	100 %	1.151 .645. 040	100 %	2.403 .795. 199	100 %	2.129 .579. 880	100 %	2.167 .301. 480	100 %	2.284 .031. 628	100 %	10.13 6.353 .227	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		0.00.01.1.09.011	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a unit	n/a unit	17.562.000	1 unit	18.436.300	1 unit	20.411.300	1 unit	21.050.000	1 unit	21.550.000	1 unit	23.705.000	1 unit	105.152.600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	n/a unit	n/a unit	866.480.420	259 unit	614.840.440	259 unit	1.041.712.820	259 unit	1.054.426.680	259 unit	1.064.266.680	259 unit	1.070.693.348	259 unit	4.845.939.968	Dinas Lingkungan Hidup	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	dan Kehutanan	
		0.00.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a unit	n/a unit	255.278.486	255 unit	213.368.300	255 unit	348.624.000	255 unit	359.103.200	255 unit	381.484.800	255 unit	419.633.280	255 unit	1.722.213.580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		0.00.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a unit	n/a unit	552.455.430	4 unit	305.000.000	4 unit	993.047.079	4 unit	695.000.000	4 unit	700.000.000	4 unit	770.000.000	4 unit	3.463.047.079	Dinas Lingkungan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi																	Hidup dan Kehutanan	
				Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	n/a		82,35%		85,91%		92,76%		94,33%		100%		100%			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21.43%	21.43%		24,44%		25%		25,34%		25,66%		26,58%		26,58%		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,28		6		6,11		6,03		5,94		5,86		5,86			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	60%	60%	0	60%	217.268.400	80%	400.000.000	n/a	0	n/a	0	100%	250.000.000	100%	867.268.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	n/a	n/a		30%		n/a		n/a		n/a		n/a		30%			
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Terlaksananya penyusunan muatan	1 dokumen	1 dokumen	0	2 dokumen	85.000.000	3 dokumen	303.279.700	0	0	0	0	0	0	3 dokumen	388.279.700	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	RPPLH Provinsi																Hidup dan Kehutanan	
		2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	303.279.700	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	388.279.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi	n/a	n/a	0	2 dokumen	132.268.400	0	96.720.300	0	0	0	0	3 dokumen	250.000.000	3 dokumen	478.988.700	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			(KLHS) Provinsi																		p dan Kehutanan	
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	30.261.200	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	30.261.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		2.11.02.1.	Pembuatan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen KLHS	n/a dok	n/a dok	0	1 dokumen	102.007.200	1 dokumen	96.720.300	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	448.727.500	Dinas Ling	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		02.02	aan KLHS RPJPD/RPJMD	RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	umen	umen															kungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	n/a	n/a	2.174.915.990	0,6%	1.703.856.600	1,7%	5.053.429.300	2,8%	2.713.548.200	3,9%	3.367.391.400	5,1%	3.732.750.680	5,1%	16.570.976.180	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	9500 parameter uji	9500 parameter uji		13000 parameter uji		15200 parameter uji		17800 parameter uji		20830 parameter uji		24370 parameter uji		91200 parameter uji			
				Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	n/a	n/a		100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim	n/a	n/a	2.174.915.990	6 dokumen	1.310.266.300	8 dokumen	4.620.480.000	8 dokumen	2.237.304.000	8 dokumen	2.843.522.800	8 dokumen	3.156.495.180	38 dokumen	14.168.068.280	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,	n/a	n/a	947.486.750	2 dokumen	145.516.900	4 dokumen	228.360.000	4 dokumen	261.196.000	4 dokumen	277.614.000	4 dokumen	294.032.000	4 dokumen	1.206.718.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Udara, dan Laut																	
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	125.280.000	2 dokumen	133.308.000	2 dokumen	146.638.800	2 dokumen	160.302.680	2 dokumen	625.529.480	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Perubahan Iklim																			
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	n/a	n/a	1.227.429.240	2 dokumen	1.104.749.400	2 dokumen	4.266.840.000	2 dokumen	1.842.800.000	2 dokumen	2.419.270.000	2 dokumen	2.702.160.500	2 dokumen	12.335.819.900	Dinas Lingkungan dan Kehutanan	DIY	
		2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan	n/a	n/a	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	2.402.907.900	Dinas Lingkungan		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup yang Dipantau																Hidup dan Kehutanan	
		2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	n/a titik	n/a titik	0	50 titik	393.590.300	50 titik	432.949.300	50 titik	476.244.200	50 titik	523.868.600	50 titik	576.255.500	50 titik	2.402.907.900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAH	Persentase fasilitasi teknis penyimpanan	n/a	n/a	0	100%	13.258.000	100%	120.000.000	100%	94.853.000	100%	73.680.500	100%	43.284.000	100%	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			AYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi																up dan Kehutanan	
				Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	n/a	n/a		100 %		n/a		n/a		n/a		n/a		100 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	n/a	n/a	0	1 dokumen	13.258.000	2 dokumen	120.000.000	3 dokumen	94.853.000	4 dokumen	73.680.500	5 dokumen	43.284.000	5 dokumen	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Melalui	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	n/a	n/a	0	1 dokumen	13.258.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	94.853.000	1 dokumen	73.680.500	1 dokumen	43.284.000	1 dokumen	345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase terawainya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang	n/a	n/a	285.151.000	48,65%	160.252.200	75,68%	446.260.000	78,92%	355.100.000	82,16%	372.000.000	85,41%	383.290.000	85,41%	1.716.902.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	diterbitkan oleh Provinsi																		
				Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	n/a	n/a		87,5 %		n/a		n/a		n/a		n/a		87,5 %				
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang	Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang	n/a	n/a	285.151.000	90 usaha/kegiatan	160.252.200	140 usaha/kegiatan	446.260.000	146 usaha/kegiatan	355.100.000	152 usaha/kegiatan	372.000.000	158 usaha/kegiatan	383.290.000	158 usaha/kegiatan	1.716.902.200	Dinas Lingkungan Hidup dan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi																Kehutanan	
		2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	n/a dokumen	n/a dokumen	192.360.000	1 dokumen	85.264.000	1 dokumen	195.860.000	1 dokumen	97.500.000	1 dokumen	98.560.000	1 dokumen	101.250.000	1 dokumen	578.434.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	n/a orang	n/a orang	0	20 orang	14.425.700	32 orang	86.000.000	33 orang	88.000.000	34 orang	90.000.000	35 orang	92.000.000	154 orang	370.425.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	n/a laporan	n/a laporan	92.791.000	1 laporan	60.562.500	1 laporan	164.400.000	1 laporan	169.600.000	1 laporan	183.440.000	1 laporan	190.040.000	1 laporan	768.042.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi																utan an	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya	n/a	n/a	0	16%	152.242.000	34%	120.831.000	54%	130.622.500	76%	154.000.000	100%	207.269.000	100%	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			<b>UNTUK MASYARAKAT</b>																			
				Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	n/a	n/a		21,05%		n/a		n/a		n/a		n/a		21,05%				
		2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	n/a	n/a	0	40 entitas	152.242.000	85 entitas	120.831.000	135 entitas	130.622.500	190 entitas	154.000.000	250 entitas	207.269.000	250 entitas	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi																	Kehutanan	
		2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	n/a lembaga	n/a lembaga	0	40 lembaga	152.242.000	45 lembaga	120.831.000	50 lembaga	130.622.500	55 lembaga	154.000.000	60 lembaga	207.269.000	60 lembaga	764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			KeMasyarakatan	terkait PPLH																	
		2.11.09	PROGRAM PENGHA RGAAN LINGKUN GAN HIDUP UNTUK MASYAR AKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	16.67%	16.67%	452.009.000	16.67%	185.648.500	35%	173.252.900	55%	140.680.000	76.67%	180.252.900	100%	150.400.000	100%	830.234.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Persentase capaian kinerja penghargaan	n/a	n/a		100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				lingkungan hidup																	
		2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19 entitas	19 entitas	452.009.000	19 entitas	185.648.500	44 entitas	173.252.900	69 entitas	140.680.000	94 entitas	180.252.900	119 entitas	150.400.000	119 entitas	830.234.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	n/a entitas	n/a entitas	452.009.000	25 entitas	185.648.500	25 entitas	173.252.900	25 entitas	140.680.000	25 entitas	180.252.900	25 entitas	150.400.000	25 entitas	830.234.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN</b>	<b>Persentase jumlah aduan yang</b>	n/a	n/a	0	100%	27.227.800	100%	105.000.000	100%	77.000.000	100%	105.000.000	100%	117.000.000	100%	431.227.800	Dinas Lingkungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			<b>PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>selesai dilayani (%)</b>																	<b>gan Hidup dan Kehutanan</b>	
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	n/a	n/a	0	100%	27.227.800	100%	105.000.000	100%	77.000.000	100%	105.000.000	100%	117.000.000	100%	431.227.800		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	n/a dokumen	n/a dokumen	0	1 dokumen	27.227.800	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	105.000.000	1 dokumen	117.000.000	1 dokumen	431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100%	100%	28.520.338.278	100%	38.363.999.200	100%	48.916.004.100	100%	40.258.716.882	100%	59.010.807.195	100%	60.391.887.915	100%	246.941.415.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	85,71%	85,71%		92,86%		n/a		n/a		n/a		n/a		92,86%			
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100%	100%	28.520.338.278	100%	38.363.999.200	100%	48.916.004.100	100%	40.258.716.882	100%	59.010.807.195	100%	60.391.887.915	100%	246.941.415.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				utan an	
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	n/a dokumen	n/a dokumen	196.749.000	0 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	66.901.250	1 dokumen	69.810.000	1 dokumen	76.791.000	4 dokumen	213.502.250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di	n/a ton	n/a ton	0	750 ton	23.038.947.000	350 ton	24.254.000.000	350 ton	27.500.000.000	600 ton	45.000.000.000	600 ton	45.000.000.000	600 ton	164.792.947.000	Dinas Lingkungan Hidup	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				TPA/TPST Regional																	dan Kehutanan	
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	n/a unit	n/a unit	28.159.654.278	12 unit	12.585.518.000	13 unit	24.339.725.800	13 unit	12.000.000.000	13 unit	13.200.000.000	13 unit	14.520.000.000	13 unit	76.645.243.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPS	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di	n/a	n/a	0	750 ton	406.459.200	350 ton	235.867.200	350 ton	491.815.632	600 ton	540.997.195	600 ton	595.096.915	600 ton	2.270.236.142	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			T Regional	TPA/TPST Regional yang Ditetapkan																Kehutanan	
		2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	n/a unit	n/a unit	163.935.000	3 unit	2.333.075.000	3 unit	86.411.100	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	15 unit	3.019.486.100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
	Terwujudnya pengelolaan hutan			Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	n/a		5%		5%		5%		5%		5%		5%		Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	lesteri																				dan Kehutanan	
		2.10.11	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta	57%	57%	285.000.000	71%	199.640.000	85%	447.355.000	100%	500.000.000	n/a	0	n/a	0	100%	1.146.995.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
				Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen		30 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		30 dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	1 laporan	1 laporan	285.000.000	1 laporan	199.640.000	1 laporan	447.355.000	n/a	500.000.000	n/a	0	n/a	0	3 laporan	1.146.995.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	285.000.000	1 dokumen	199.640.000	1 dokumen	447.355.000	1 dokumen	500.000.000	n/a dokumen	0	n/a dokumen	0	6 dokumen	1.146.995.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.22.08	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan / kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	n/a	n/a	3.30 3.42 4.75 0	0,23 %	8.147 .250. 000	0,45 %	2.756 .255. 000	1,37 %	7.943 .200. 000	24,9 2%	5.100 .000. 000	30,1 4%	5.200 .000. 000	30,1 4%	29.14 6.705 .000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Jumlah budaya benda dan tidak benda	7 entitas	7 entitas		7 entitas		n/a		n/a		n/a		n/a		7 entitas			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				yang dikelola dan dilestarikan																	
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	n/a	n/a	0	1	98.000.000	1	98.500.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	2.146.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	0 unit	0 unit	0	1 unit	98.000.000	1 unit	98.500.000	1 unit	600.000.000	1 unit	650.000.000	1 unit	700.000.000	1 unit	2.146.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																					dan Kehutanan	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaannya	100%	100%	56.476.000	n/a	0	n/a	0	100%	3.970.000.000	n/a	200.000.000	n/a	200.000.000	100%	4.370.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	4 unit	4 unit	56.476.000	n/a unit	0	n/a unit	0	9 unit	3.970.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	15 unit	4.370.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
																						Kehutanan	
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100%	100%	2.849.948.750	100%	400.000.000	100%	507.755.000	100%	173.200.000	100%	850.000.000	100%	900.000.000	100%	2.830.955.000			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2	2	2.849.948.750	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	2	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				utan an	
		2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	n/a objek	n/a objek	0	2 objek	400.000.000	2 objek	507.755.000	2 objek	173.200.000	2 objek	850.000.000	2 objek	900.000.000	2 objek	2.830.955.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/ keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau	n/a	n/a	397.000.000	2	7.649.250.000	4	2.150.000.000	6	3.200.000.000	8	3.400.000.000	10	3.400.000.000	10	19.799.250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																					utan an	
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	1 laporan	397.000.000	1 laporan	7.649.250.000	1 laporan	2.150.000.000	1 laporan	3.200.000.000	1 laporan	3.400.000.000	1 laporan	3.400.000.000	1 laporan	19.799.250.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	n/a	n/a	7.093.224.041	79,6	6.687.800.356	80,65	14.511.009.138	91,175	60.766.205.432	81,925	15.922.007.665	82,375	18.424.107.374	82,375	116.311.129.965	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																				utan	
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	n/a	n/a		5%		5%		5%		5%		5%		5%			
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	78,95%	78,95%		78,95%		84,21%		89,47%		94,74%		100%		100%			
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	5,86%	5,86%		5,86%		23,53%		45,11%		70,6%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	n/a	n/a		69,33		n/a		n/a		n/a		n/a		69,33			
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	n/a	n/a	0	2 dokumen	122.555.400	3 dokumen	258.850.000	4 dokumen	253.862.500	5 dokumen	291.941.875	6 dokumen	1.206.233.156	6 dokumen	2.133.442.931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelola	n/a	n/a	0	2 dokumen	122.555.400	1 dokumen	258.850.000	1 dokumen	253.862.500	1 dokumen	291.941.875	2 dokumen	1.206.233.156	7 dokumen	2.133.442.931	Dinas Lingkungan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an Kesatuan Pengelolaan Hutan	an Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun																an Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan	n/a	n/a	5.368.045.541	15.581 ha	5.313.061.370	15.581 ha	9.228.468.662	15.581 ha	55.671.569.792	15.581 ha	10.290.598.958	15.581 ha	11.476.141.869	15.581 ha	91.979.840.651	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	n/a dokumen	n/a dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	49.850.800	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	274.850.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	43 dokumen	15.434.100	43 dokumen	49.875.500	43 dokumen	70.000.000	43 dokumen	90.000.000	43 dokumen	110.000.000	43 dokumen	335.309.600	Dinas Lingkungan Hidup	DIY



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Produksi yang Disahkan																dan Kehutanan	
		3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	n/a dokumen	n/a dokumen	0	8 dokumen	3.516.700	8 dokumen	14.390.000	8 dokumen	25.000.000	8 dokumen	35.000.000	8 dokumen	55.000.000	8 dokumen	132.906.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Laporan Pemanfaatan hutan di KPH	n/a laporan	n/a laporan	5.368.045.541	1 laporan	4.701.402.370	1 laporan	6.821.210.562	1 laporan	53.178.319.792	1 laporan	7.494.611.458	1 laporan	8.272.006.244	1 laporan	80.467.550.426	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																					Kehutanan	
		3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	n/a laporan	n/a laporan	0	1 laporan	592.708.200	1 laporan	2.293.141.800	1 laporan	2.333.250.000	1 laporan	2.595.987.500	1 laporan	2.954.135.625	1 laporan	10.769.223.125	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Rehabilitasi	n/a	n/a	0	75 ha	457.472.500	226 ha	2.281.657.776	276 ha	2.500.620.000	326 ha	2.688.035.000	376 ha	2.867.335.000	1279 ha	10.795.120.276	Dinas Ling		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			si di Luar Kawasan Hutan Negara	i Hutan dan Lahan																	kungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	n/a dokumen	n/a dokumen	0	2 dokumen	23.341.200	5 dokumen	273.341.000	3 dokumen	216.500.000	3 dokumen	218.500.000	3 dokumen	221.000.000	3 dokumen	952.682.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di	Luas Hutan Rakyat yang	n/a Ha	n/a Ha	0	75 Ha	195.985.200	200 Ha	524.070.000	200 Ha	524.070.000	250 Ha	562.035.000	250 Ha	562.035.000	250 Ha	2.368.195.200	Dinas Lingkungan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Luar Kawasan Hutan Negara	Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara																an Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	70.594.000	30 Ha	508.000.000	30 Ha	580.000.000	30 Ha	638.000.000	30 Ha	701.800.000	125 Ha	2.498.394.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air	Jumlah Bangunan Sipil Teknis	n/a unit	n/a unit	0	0 unit	0	7 unit	138.000.000	7 unit	158.000.000	7 unit	182.000.000	7 unit	210.000.000	7 unit	688.000.000	Dinas Lingkungan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Hutan dan Lahan	yang Terbangun																Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat	n/a batang	n/a batang	0	1000 batang	167.52.100	4000 batang	564.830.226	4000 batang	735.050.000	4000 batang	786.500.000	4000 batang	841.500.000	4000 batang	3.095.432.326	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang	n/a ha	n/a ha	0	0 ha	0	1 ha	273.416.550	1 ha	287.000.000	1 ha	301.000.000	1 ha	331.000.000	4 ha	1.192.416.550	Dinas Lingkungan Hidup	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Direhabilitasi																	p dan Kehutanan	
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	88,03%	88,03%	1.140,99	90,22%	641.092.700	92,42%	2.400.113.600	94,62%	1.971.887.550	96,95%	2.254.745.683	97%	2.468.936.285	97%	9.736.775.818	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	925.421.000	15581 ha	454.263.100	15581 ha	1.830.650.200	15581 ha	1.426.887.550	15581 ha	1.682.170.683	15581 ha	1.868.246.285	15581 ha	7.262.217.818	Dinas Lingkungan Hidup	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																					dan Kehutanan	
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15581 ha	15581 ha	215.573.000	15581 ha	173.923.200	15581 ha	495.211.000	15581 ha	510.000.000	15581 ha	534.945.000	15581 ha	560.690.000	15581 ha	2.274.769.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam	n/a laporan	n/a laporan	0	1 laporan	12.906.400	1 laporan	74.252.400	1 laporan	35.000.000	1 laporan	37.630.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	199.788.800	Dinas Lingkungan Hidup dan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			ggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Satu Tahun																Kehutanan	
		3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	n/a	n/a	73.195.000	28 unit manajemen	78.429.286	28 unit manajemen	227.868.000	28 unit manajemen	244.260.000	28 unit manajemen	261.450.000	28 unit manajemen	280.000.000	28 unit manajemen	1.092.007.286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	n/a	n/a	0	0	0	13	65.00	18	70.00	23	75.00	28	80.00	28	290.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	n/a dokumen	n/a dokumen	73.195.000	1 dokumen	78.429.286	1 dokumen	162.868.000	1 dokumen	174.260.000	1 dokumen	186.450.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	802.007.286	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	100%	100%	51.989.500	100%	75.189.100	100%	114.051.100	100%	124.005.590	100%	135.236.149	100%	125.461.064	100%	573.943.003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	58.670.000	1 sertifikat	18.132.700	1 sertifikat	21.050.000	1 sertifikat	22.740.000	1 sertifikat	24.650.000	1 sertifikat	26.525.000	1 sertifikat	113.097.700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	0	1 sertifikat	9.673.800	1 sertifikat	11.800.000	1 sertifikat	12.680.000	1 sertifikat	13.700.000	1 sertifikat	14.800.000	1 sertifikat	62.653.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	n/a sertifikat	n/a sertifikat	16.177.000	1 sertifikat	12.653.400	1 sertifikat	13.665.000	1 sertifikat	14.750.000	1 sertifikat	16.000.000	1 sertifikat	17.200.000	1 sertifikat	74.268.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	n/a laporan	n/a laporan	436.142.500	1 laporan	16.318.800	1 laporan	19.050.000	1 laporan	20.500.000	1 laporan	22.217.000	1 laporan	2.400.000	1 laporan	80.485.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	n/a ha	n/a ha	0	5 ha	18.410.400	5 ha	48.486.100	5 ha	53.335.590	5 ha	58.669.149	5 ha	64.536.064	5 ha	243.437.303	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a	401.240.000	66 indeks	402.150.400	66 indeks	1.334.200.000	67 indeks	1.344.100.000	68 indeks	1.388.400.000	69 indeks	1.272.600.000	69 indeks	5.741.450.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
				Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	n/a		68,53		n/a		n/a		n/a		n/a		68,53			
		3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	634,10 ha	634,10 ha	401.240.000	634,10 ha	219.120.900	634,10 ha	822.200.000	634,10 ha	812.100.000	634,10 ha	836.400.000	634,10 ha	700.600.000	634,10 ha	3.390.420.900	Dinas Lingkungan Hidup	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
																					dan Kehutanan	
		3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	n/a laporan	n/a laporan	401.240.000	1 laporan	94.058.500	1 laporan	314.769.500	1 laporan	172.600.000	1 laporan	189.900.000	1 laporan	208.600.000	1 laporan	979.928.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan	n/a ha	n/a ha	0	6 ha	107.649.700	6 ha	270.046.400	6 ha	359.000.000	6 ha	377.000.000	6 ha	396.000.000	6 ha	1.509.696.100	Dinas Lingkungan Hidup	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			TAHURA Provinsi	Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi																	p dan Kehutanan	
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	n/a desa	n/a desa	0	4 desa	17.412.700	4 desa	237.384.100	4 desa	280.500.000	4 desa	269.500.000	4 desa	96.000.000	4 desa	900.796.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY	
		3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah	Terlaksananya Pengelolaannya Kawasan Bernilai Ekosistem	3	3	0	3	183.029.500	3	512.000.000	3	532.000.000	3	552.000.000	3	572.000.000	3	2.351.029.500	Dinas Lingkungan Hidup		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			Penyanga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestaria n Alam	Penting, Daerah Penyanga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestaria n Alam yang dikelola																	dan Keh utan an	
		3.28. 04.1. 03.0 3	Perencana aan Pemanfaat an Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencana an Pemanfaat an Lahan Basah	n/a dok ume n	n/a dok um en	0	3 doku men	74.72 5.700	3 doku men	150.0 00.00 0	3 doku men	170.0 00.00 0	3 doku men	190.0 00.00 0	3 doku men	210.0 00.00 0	3 doku men	794.7 25.70 0	Dina s Ling kung an Hidu p dan Keh utan an	DI Y	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.28.04.1.03.006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	n/a Ha	n/a Ha	0	5 Ha	108.303.800	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	362.000.000	10 Ha	1.556.303.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBER	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	18,86%	18,86%	1.475.043.000	19,09%	139.494.800	19,96%	439.817.300	20,82%	468.799.100	21,69%	509.978.900	22,55%	552.676.900	22,55%	2.110.767.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			<b>DAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>																		utan an	
				Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya	18,68%	18,68%		22,17%		n/a		n/a		n/a		n/a		22,17%				
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan	n/a	n/a	1.475.043.000	5 kelompok	139.494.800	10 kelompok	439.817.300	15 kelompok	468.799.100	20 kelompok	509.978.900	25 kelompok	552.676.900	25 kelompok	2.110.767.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Keh		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Masyarakat di Bidang Kehutanan	masyarakat																utan an	
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	n/a orang	n/a orang	118.570.000	59 orang	42.881.600	57 orang	250.427.000	57 orang	260.469.700	57 orang	280.816.700	57 orang	300.598.400	57 orang	1.135.193.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIY
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembag	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	n/a kelompok	n/a kelompok	1.356.473.000	5 kelompok	96.613.200	10 kelompok	189.390.300	10 kelompok	208.329.400	10 kelompok	229.162.200	10 kelompok	252.078.500	45 kelompok	975.573.600	Dinas Lingkungan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi										
						Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp														
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)										
			aan Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan																Hidup dan Kehutanan											
<b>Total</b>						<b>92.2</b>	<b>70.7</b>		<b>103.9</b>	<b>42.43</b>		<b>128.2</b>	<b>89.41</b>	<b>8.461</b>		<b>167.4</b>	<b>17.01</b>	<b>4.312</b>		<b>140.2</b>	<b>81.30</b>	<b>6.304</b>		<b>146.6</b>	<b>18.16</b>	<b>6.852</b>		<b>686.5</b>	<b>48.33</b>	<b>8.493</b>	

## BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 Pasal 4, tugas Dinas adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Merujuk pada hal tersebut, maka indikator kinerja DLHK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD DIY ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 23 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujua n	Indikator Tujuan	Sasar an	Indikat or Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sa saran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kon disi Akhi r Tahu n (202 7)
						Tahun ke-1 (2023)	Tah un ke-2 (202 4)	Tah un ke-3 (202 5)	Tah un ke-4 (202 6)	Tah un ke-5 (202 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terca painya a perlin dunga n dan penge lolaan lingku ngan hidup serta terwu judnya a penge lolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			n/a	82,35%	85,9 1%	92,7 6%	94,3 3%	100 %	100 %
			Tercapainya perlin dunga n dan pengel olaan lingku ngan hidup	Persenta se ketaatan penangg ung jawab usaha dan/ata u kegiatan terhada p izin lingkung an, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitk	21.43%	24,44%	25%	25,3 4%	25,6 6%	26,5 8%	26,5 8%

No	Tujua n	Indikator Tujuan	Sasar an	Indikat or Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sa saran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kon disi Akhi r Tahu n (202 7)
						Tahun ke-1 (2023)	Tah un ke-2 (202 4)	Tah un ke-3 (202 5)	Tah un ke-4 (202 6)	Tah un ke-5 (202 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				an oleh Provinsi							
				Nilai indeks pencema ran sungai lintas kab/kot a	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
			Terwu judnya pengel olaan hutan lestari	Peningk atan jumlah produksi sektor kehutan an	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
			Menin gkatny a Tata Kelola Penyel enggar aan Urusa n Pemer intah n di Peran gkat Daera h	Kategori Reforma si Birokras i Perangk at Daerah	A	A	A	A	A	A	A
			Tercap ainya perlin dunga n dan pengel olaan lingku ngan hidup	Persenta se ketaatan penangg ung jawab usaha dan/ata u kegiatan terhada p izin lingkung an, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitk an oleh Provinsi	21.43%	24,44%	25%	25,3 4%	25,6 6%	26,5 8%	26,5 8%
				Nilai indeks pencema ran sungai lintas	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86

No	Tujua n	Indikator Tujuan	Sasar an	Indikat or Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sa saran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kon disi Akhi r Tahu n (202 7)
						Tahun ke-1 (2023)	Tah un ke-2 (202 4)	Tah un ke-3 (202 5)	Tah un ke-4 (202 6)	Tah un ke-5 (202 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				kab/kot a							
			Terwu judnya pengel olaan hutan lestari	Persenta se Luas lahan kritis yang direhabi litasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15 %	4,61 %	4,82 %	5,87 %	5,87 %



## **BAB 8 PENUTUP**

---

### **8.1 Catatan Penting**

Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY 2022 – 2027 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renstra melalui forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dengan tujuan mempertajam, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati isu – isu strategis 5 tahun mendatang, tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah Jangka Menengah, strategi dan kebijakan pelayanan, program dan kegiatan 5 tahun mendatang, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rancangan Akhir awal RPJMD.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 050/0067 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2022 - 2027 maka disusunlah dokumen Rancangan Akhir yang untuk kemudian melalui mekanisme Forum OPD menjadi dokumen Rancangan Akhir Renstra yang disempurnakan.

DLHK DIY dalam menentukan program/kegiatan/subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan:

- a. Penyeragaman program prioritas nasional dalam RPJMD Tahun 2020 – 2024
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra DLHK DIY periode sebelumnya melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan dengan tahun 2021
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome)
- d. Isu – isu strategis yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

- e. Kebijakan nasional
- f. Regulasi yang berlaku
- g. Saran dan/atau masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah

### **8.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rancangan Akhir Renstra DLHK DIY Tahun 2022 - 2027 akan disempurnakan menjadi dokumen Renstra DLHK DIY Tahun 2022 – 2027.

**Yogyakarta, 05 Mei 2023**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan DIY**



**Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si**  
NIP. 196509041992031017

# LAMPIRAN





Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kesatu** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022-2027 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:
- a. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya
  - b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
  - c. Menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
  - d. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
  - e. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  - f. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan dinas komunikasi dan informatika;
  - g. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
  - h. Melaksanakan penajaman terhadap Indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika;
  - i. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas;
  - j. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

Menyusun...

k. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022 - 2027;

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta .

Pada tanggal 14 Oktober 2022

KEPALA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR: 050/34665  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 – 2027

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2022 - 2027

No.	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	Drs. Bayu Februarino Putro
3.	Anggota Kelompok Kerja	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam	Fery Maryulianti, Sp
		Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan	Ir. Niken Aryati, M.P.
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Ninik Sri Handayani, S.Si
		Kepala Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup	Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes.
		Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	Wawan Setiyo Tjahjono, S.P., M.M.A.
		Kepala Balai Pengelolaan Sampah	Drs. Jito
		Kepala Balai Perbenihan Kehutanan	Ir.. Tri Basuki Sundoro, M.Sc.
		Kepala Balai Tahura Bunder	Sabam Benedictus Silalahi, S.Hut, MP
		Kepala Balai Laboratorium Lingkungan	Ir. Reni Anggraeni, M.Sc.
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Program	Cahyani Alfiah, S.Si, M.Sc
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Wahyu Prasetyo Aji, Sp, M.Si
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Nurul Kartika Putri, S.Si, M.URP, MPS
		Analisis Perencanaan	Peni Yulianto, ST
Pengelola Informasi	Irwina Fiki Himmah, S.Tr.Kes		

KEPALA  
  
 KUNCORO CAHYO AJI



**2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Argulobang No.19, Yogyakarta**